





RENCANA STRATEGIS

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 telah dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025–2029.

Penyusunan Renstra ini disusun secara simultan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur berpedoman pada tugas pokok, fungsi serta kewenangan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pembangunan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Semoga Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan tugasnya.

Jakarta, 23 September 2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munjirin
NIP 197108011994031002

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

I.1. Latar Belakang **I-1**

I.2. Dasar Hukum Penyusunan **I-3**

I.3. Maksud dan Tujuan **I-5**

I.3.1. Maksud I-5

I.3.2. Tujuan I-5

I.4. Sistematika Penulisan **I-5**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR **II-1**

II.1. Gambaran Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur **II-1**

II.1.1. Gambaran Umum Wilayah II-1

A. Profil Administrasi Daerah II-1

B. Profil Demografi II-2

C. Profil Kesejahteraan Masyarakat II-6

D. Profil Resiliensi Terhadap Bencana II-10

II.1.2. Tugas, fungsi dan struktur Kota Administrasi Jakarta Timur II-12

A. Tugas II-12

B. Fungsi II-12

C. Struktur Perangkat Daerah II-14

II.1.3. Sumber daya Kota Administrasi Jakarta Timur II-17

A. Sumber Daya Manusia II-17

B. Aset atau Modal II-20

II.1.4. Kinerja Pelayanan II-40

II.1.5. Kelompok sasaran layanan II-46

II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah II-46

II.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah II-47

II.2.2. Isu Lingkungan Dinamis II-49

A. Identifikasi Isu Skala Global II-49

B. Identifikasi Isu Skala Nasional II-51

C. Identifikasi Isu Skala Regional II-53

D. Isu Strategis Jakarta Timur II-63

II.2.3. Rumusan Isu Strategis 2025–2029 ..... II-65

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN III-1

III.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 ..... III-1

III.2. Pengembangan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Penentuan Arah Kebijakan III-3

III.3. Arah Kebijakan RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025–2029 ..... III-7

III.4. Strategi Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 . III-11

III.5. Arahan Kebijakan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 ..... III-12

III.6. Penyusunan Pohon Kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 –2029 ..... III-14

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN IV-1

IV.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan IV-1

IV.2. Program Prioritas Daerah IV-41

IV.3. Program Prioritas Perangkat Daerah IV-41

IV.3.1. Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan IV-42

IV.3.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan IV-43

IV.3.3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi IV-44

IV.3.4. Program Pengelolaan Kota Administrasi IV-45

IV.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan IV-48

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan II-2
Tabel II.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Koa Administrasi Jakarta Timur Menurut Kecamatan Tahun 2020–2024 ..... II-3
Tabel II.3 Rekapitulasi Tingkat Risiko Bencana di Kota Administrasi Jakarta Timur II-11
Tabel II.4 Penyederhanaan Jabatan Administrasi pada Level Jabatan Pengawas Kota Administrasi Jakarta Timur II-16
Tabel II.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur II-17
Tabel II.6 Jumlah Pegawai Menurut Golongan II-18
Tabel II.7 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan II-19
Tabel II.8 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Kota Administrasi Jakarta Timur II-20
Tabel II.9 Aset/Modal Bangunan di Kantor Walikota Jakarta Timur II-22
Tabel II.10 Rumah Dinas Walikota Jakarta Timur II-22
Tabel II.11 Bangunan Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Timur II-24
Tabel II.12 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Timur II-25
Tabel II.13 Bangunan Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur II-27
Tabel II.14 Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur II-33
Tabel II.15 Realisasi Target Capaian Program Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020–2022 ..... II-41
Tabel II.16 Realisasi Target Capaian Program Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 dan 2024 ..... II-43
Tabel II.17 Hasil Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020–2024 ..... II-44
Tabel II.18 Capaian Indikator Makro Jakarta Timur II-45
Tabel II.19 Sistem Pusat Pelayanan Jakarta Timur II-54
Tabel II.20 Tujuan dan Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Jakarta Timur dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi II-55
Tabel II.21 Identifikasi Permasalahan dan Sintesis Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 ..... II-64
Tabel II.22 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 ..... II-66
Tabel III.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Jakarta Timur 2025–2029 ..... III-3
Tabel III.2 PDRB Jakarta Timur Berdasarkan Lapangan Usaha (dalam Miliar Rupiah) III-8
Tabel III.3 Target Indikator Strategis Wilayah Jakarta Timur III-11
Tabel III.4 Penahapan Strategi Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur III-12
Tabel III.5 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur III-13

Tabel III.6 Merumuskan Tujuan Renstra Jakarta Timur berdasarkan Isu Strategis... III-16
Tabel III.7 Merumuskan Sasaran Renstra berdasarkan CSF Tujuan Renstra III-17
Tabel III.8 Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra III-17
Tabel IV.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kota Administrasi.....IV-2
Tabel IV.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....IV-25
Tabel IV.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-41
Tabel IV.4 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Perangkat Daerah IV-47
Tabel IV.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 .....IV-48
Tabel IV.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 .....IV-49

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Kota Administrasi Jakarta Timur II-1
Gambar II.2 Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020–2024 ..... II-3
Gambar II.3 Piramida Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 ..... II-4
Gambar II.4 Diagram Perbandingan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan II-5
Gambar II.5 Nilai PDRB per Kapita Tahun 2020–2024 ..... II-6
Gambar II.6 Diagram Garis kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020–2024 ..... II-7
Gambar II.7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020–2024 ..... II-8
Gambar II.8 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-9
Gambar II.9 Grafik Indeks Risiko Bencana Provinsi Jakarta dan Kota Administrasi Jakarta Timur II-10
Gambar II.10 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Kota Administrasi Jakarta Timur II-15
Gambar II.11 Grafik Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020–2024 ..... II-40
Gambar II.12 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan II-51
Gambar II.13 Strategi Pengembangan Wilayah RPJMN 2025–2029 ..... II-52
Gambar III.1 Hubungan sinergis antara Tujuan dengan Dokumen Pembangunan Lainnya III-2
Gambar III.2 Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kota Jakarta Timur III-4
Gambar III.3 Museum Benyamin Sueb III-6
Gambar III.4 Hasil Analisis LQ dan Shift Share Kota Administrasi Jakarta Timur III-9
Gambar IV.1 Pembinaan Perwakilan RT, RW, LMK Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur IV-43
Gambar IV.2 Pelaksanaan Penanaman Bibit Cabai oleh Tim Penggerak PKK Kota Jakarta Timur IV-44
Gambar IV.3 Rehab Kantor Kelurahan Ujung Menteng IV-45

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di tingkat Pusat maupun Daerah. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan visi pembangunan Nasional, sehingga terjamin adanya keterpaduan dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Amanat dari undang-undang ini menegaskan bahwa rencana pembangunan Daerah harus disusun secara terintegrasi, berjenjang, dan selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional. Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa arah pembangunan daerah senantiasa mendukung pencapaian visi pembangunan Nasional.

Dalam konteks Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2045 telah menetapkan visi jangka panjang pembangunan, yaitu *“Jakarta Kota Global yang Maju, Berdaya Saing, Berkeadilan, dan Berkelanjutan”*, yang mencerminkan komitmen Jakarta dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Nasional. Selanjutnya, RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, sebagai tahap awal operasionalisasi RPJPD, memuat visi pembangunan lima tahunan yaitu *“Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya.”* Sejalan dengan itu, penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 memiliki peran strategis sebagai pedoman operasional dalam menjabarkan visi dan misi Gubernur DKI Jakarta pada tingkat Kota Administratif.

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah terluas dengan pertumbuhan pesat di Provinsi DKI Jakarta. Perkembangan ini membawa tantangan kompleks yang perlu ditangani melalui perencanaan strategis yang komprehensif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah

Daerah, dalam menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Renstra juga merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unsur pembantu Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan memiliki tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Kota Administrasi Jakarta Timur wajib menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur disusun secara simultan dengan penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2025–2029.

Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2025–2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis bermanfaat bagi masyarakat Jakarta Timur khususnya dan masyarakat DKI Jakarta pada umumnya.

Proses penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur dilaksanakan dengan beberapa tahapan sesuai Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Penyusunan Rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Penetapan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur;

5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur dan Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Renstra Tahun 2025–2029;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
7. Penetapan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029.

Secara keseluruhan, Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah pembangunan wilayah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur. Dengan disusunnya Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 diharapkan seluruh entitas Kota Administrasi Jakarta Timur mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan urusan pemerintahan umum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan kota dan kualitas hidup masyarakat.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam Penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025-2029, sejumlah rujukan peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2029 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5990 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045;
22. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja;
23. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia;
24. Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
25. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0014 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025–2029 melalui Sistem Informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan
26. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0023 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud

Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Jakarta Timur 2025–2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Gubernur DKI Jakarta.

I.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, yaitu:

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan mengoordinasikan antar perangkat daerah, lintas sektor dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan daerah di Jakarta Timur secara konsisten, adaptif, integratif, kolaboratif dan berkelanjutan;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya;
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; dan
4. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian ini terdapat 4 (empat) sub bab yaitu:

I.1. Latar Belakang;

I.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra;

I.3. Maksud dan Tujuan; dan

I.4. Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab II ini menjelaskan dan menyajikan data-data dan informasi gambaran umum kondisi Kota Administrasi Jakarta Timur tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, dan kelompok sasaran layanan. Sebagai sintesis dari seluruh data yang disajikan telah teridentifikasi permasalahan pembangunan dan rumusan isu strategis Kota Administrasi Jakarta Timur. Pada Bagian ini terdapat 2 (dua) sub bab yaitu:

II.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; dan

II.2. Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arahan Kebijakan

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025–2029. Pada Bagian ini terdapat 6 (enam) sub bab yaitu:

III.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Jakarta Timur Tahun 2025-2029;

III.2. Pengembangan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Penentuan Arah Kebijakan;

III.3. Arah Kebijakan RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025–2029;

III.4. Strategi Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029;

III.5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Jakarta Timur Tahun 2025–2029; dan

III.6. Penyusunan Pohon Kinerja Renstra Jakarta Timur Tahun 2025–2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian ini menguraikan program, kegiatan, subkegiatan, kinerja, indikator, target, pagu indikatif dan uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan efektif dan efisien. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan sasaran, *outcome*, dan

output yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Pada Bagian ini terdapat 4 (empat) sub bab yaitu:

IV.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan;

IV.2. Program Prioritas Daerah;

IV.3. Program Perangkat Daerah; dan

IV.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

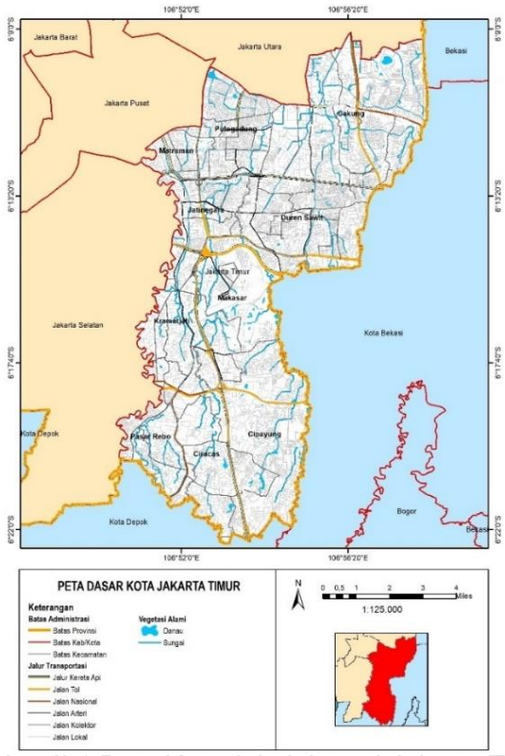
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

II.1. Gambaran Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur

II.1.1. Gambaran Umum Wilayah

A. Profil Administrasi Daerah

Kota Jakarta Timur merupakan bagian dari wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terletak antara 106°49’35” Bujur Timur dan 06°10’37” Lintang Selatan. Mayoritas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari dataran rendah, dengan beberapa daerah yang lebih tinggi, meskipun ketinggian rata-rata keseluruhan adalah sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur berbatasan di sebelah utara dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, di sebelah timur dengan Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat), sebelah selatan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat), dan sebelah barat dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lokasi geografis Jakarta Timur yang strategis menjadi faktor pendorong pembangunan wilayah, dan begitu pula sebaliknya pembangunan wilayah Jakarta Timur juga dipengaruhi oleh perkembangan kota di sekitarnya.



Gambar II.1 Peta Kota Administrasi Jakarta Timur
Sumber: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Kota Administrasi Jakarta Timur mencakup 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Memiliki luas wilayah 18.553,8 Ha yang berkontribusi pada 28,39 persen dari total luas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Timur sekaligus menjadi wilayah terluas di DKI Jakarta.

Tabel II.1 Jumlah Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Area (Ha)	Jumlah		
			Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Matraman	488	6	62	795
2.	Pulogadung	1.561	7	95	1.036
3.	Jatinegara	1.025	8	91	1.111
4.	Kramat Jati	1.300	7	65	644
5.	Pasar Rebo	1.298	5	53	527
6.	Cakung	4.228	7	91	1.045
7.	Duren Sawit	2.265	7	97	1.110
8.	Ciracas	1.608	5	49	609
9.	Makasar	2.185	5	53	567
10.	Cipayung	2.845	8	56	509
Jumlah		**18.445**	**65**	**712**	**7.953**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Timur, 2025

B. Profil Demografi

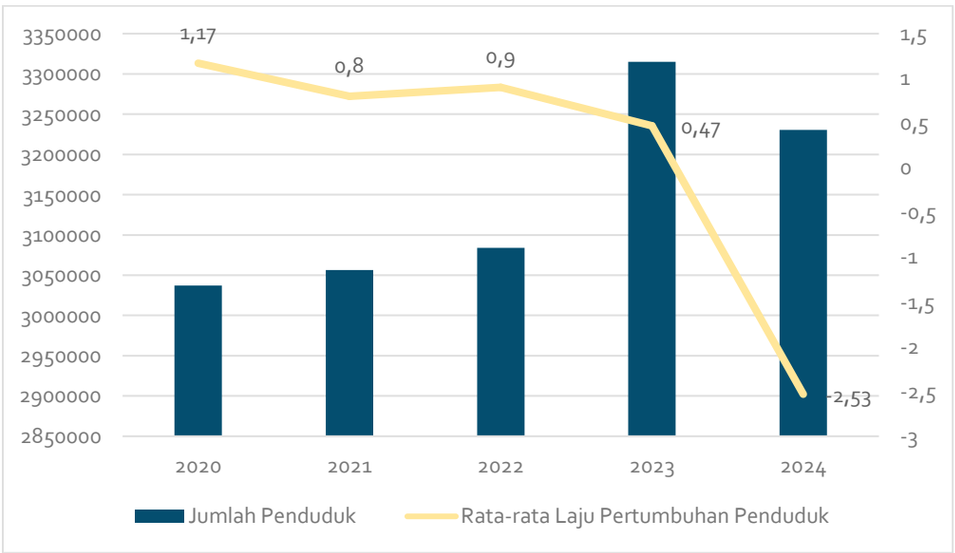
Kondisi kependudukan menjadi satu aspek vital dalam pembangunan. Seluruh aktivitas sosial dan ekonomi dan juga kondisi lingkungan sangat dipengaruhi oleh kondisi demografi. Profil demografi yang dibutuhkan dalam mendukung perencanaan pembangunan diantaranya distribusi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk untuk mengetahui proyeksi kondisi kependudukan dalam rangka perencanaan di masa depan. Distribusi jumlah penduduk dan laju penduduk dapat melihat gambar grafik jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2024 diperkirakan mencapai 3.230.417 jiwa. Jakarta Timur tercatat sebagai wilayah dengan distribusi penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disebabkan oleh luas wilayah yang lebih besar dibandingkan kota administratif lainnya, serta keberadaan sejumlah sentra industri dan perdagangan yang menjadi daya tarik bagi mobilitas penduduk. Pada periode 2020–2024, Kecamatan Cakung merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebesar 582.327 jiwa pada Tahun 2024. Sebaliknya, Kecamatan Matraman tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terendah, yakni sebanyak 182.981 jiwa pada tahun yang sama. Informasi lebih rinci mengenai perkembangan jumlah penduduk di Jakarta Timur selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Koa Administrasi Jakarta Timur Menurut Kecamatan Tahun 2020–2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Matraman	172.180	173730	175.763	190.523	182.981
2.	Pulogadung	281.319	281698	282.833	309.169	297.922
3.	Jatinegara	301.717	303687	306.489	329.481	318.819
4.	Kramat Jati	298.437	299.449	301.271	325.440	317.427
5.	Pasar Rebo	220.583	222.670	225.379	242.073	236.387
6.	Cakung	559.040	561.640	565.764	596.306	582.327
7.	Duren Sawit	414.604	415.356	417.226	457.241	445.443
8.	Ciracas	296.316	299.399	303.325	327.849	320.779
9.	Makasar	207.293	208.365	210.004	228.504	221.367
10.	Cipayung	285.650	290.306	295.829	308.528	306.965
Total		**3.037.139**	**3.056.300**	**3.083.883**	**3.315.114**	**3.230.417**

Sumber: BPS Kota Jakarta Timur, 2021–2025



Gambar II.2 Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020–2024
Sumber: BPS Kota Jakarta Timur, 2021–2025 (diolah)

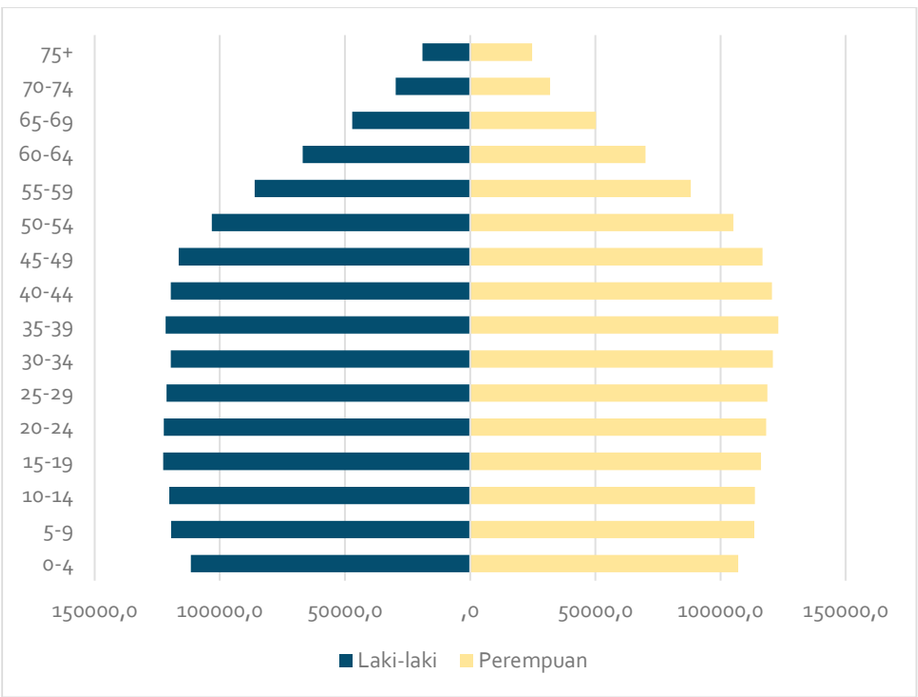
Berdasarkan data dari BPS Jakarta Timur, jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dari 3,037 juta pada Tahun 2020 menjadi sebesar 3,230 juta pada Tahun 2024. Namun demikian, sebagaimana ditampilkan pada Gambar II.2, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2024.

Secara lebih rinci, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan tajam, dari 1,7 persen pada Tahun 2020 menjadi -2,53 persen pada Tahun 2024. Penurunan jumlah penduduk ini dapat diinterpretasikan sebagai konsekuensi dari kebijakan strategis yang diterapkan Oleh Pemerintah. Penurunan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan mengindikasikan bahwa wilayah Jakarta Timur telah memasuki fase *post-urban growth* atau kejenuhan urbanisasi.

Fenomena ini dipengaruhi oleh keterbatasan ruang, tingginya biaya hidup, serta tekanan terhadap lingkungan dan kapasitas infrastruktur, yang secara kumulatif mendorong terjadinya migrasi keluar wilayah Jakarta. Selain itu, tren pembangunan yang mengarah ke wilayah luar Jakarta, seperti pengembangan kawasan industri dan kawasan perkotaan baru, turut memperkuat dinamika tersebut. Penurunan jumlah penduduk ini memiliki implikasi penting terhadap perencanaan pembangunan daerah, distribusi layanan publik, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi lokal yang perlu diantisipasi secara komprehensif dalam perumusan kebijakan ke depan.

Struktur demografi Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 1.547.132 jiwa, atau sebesar 50,13 persen dari total populasi. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk perempuan yang mencapai 1.538.878 jiwa, atau 49,87 persen dari keseluruhan penduduk. Dengan demikian, *sex ratio* Jakarta Timur pada Tahun 2024 berada pada angka 100,63, yang berarti terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Komposisi ini mencerminkan keseimbangan demografis yang relatif stabil antara jenis kelamin dan dapat menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan layanan publik yang berbasis gender.

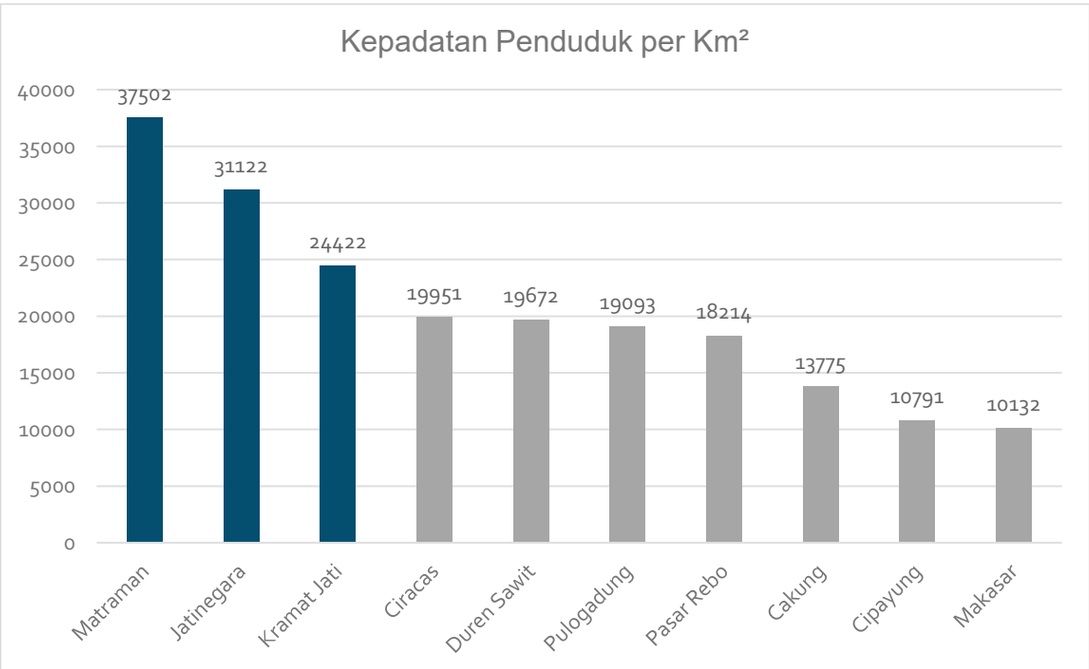
Rincian lebih lanjut mengenai perkembangan komposisi penduduk Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:



Gambar II.3 Piramida Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur Menurut Kelompok Umur Tahun 2024
Sumber: BPS Kota Jakarta, 2025 (diolah)

Lebih lanjut, berdasarkan piramida penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024, bahwa komposisi penduduk Jakarta Timur menunjukkan adanya indikasi fase bonus demografi. Fase tersebut terjadi karena proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) tercatat sebanyak 2.197.653 jiwa atau 71,21 persen lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia muda (0–14) sebanyak 685.561 jiwa atau 22,22 persen maupun lansia (65 tahun ke atas) sebanyak 202.796 jiwa atau 6,57 persen. Selanjutnya, jumlah penduduk usia anak (0–14 tahun) relatif lebih kecil dibandingkan kelompok usia dewasa, menunjukkan adanya penurunan tingkat kelahiran dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, kelompok usia produktif, khususnya pada rentang usia 20–39 tahun, terlihat mendominasi dengan jumlah yang tinggi baik pada laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini menjadi potensi besar bagi pembangunan daerah apabila penduduk usia produktif dapat diberdayakan secara optimal melalui penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

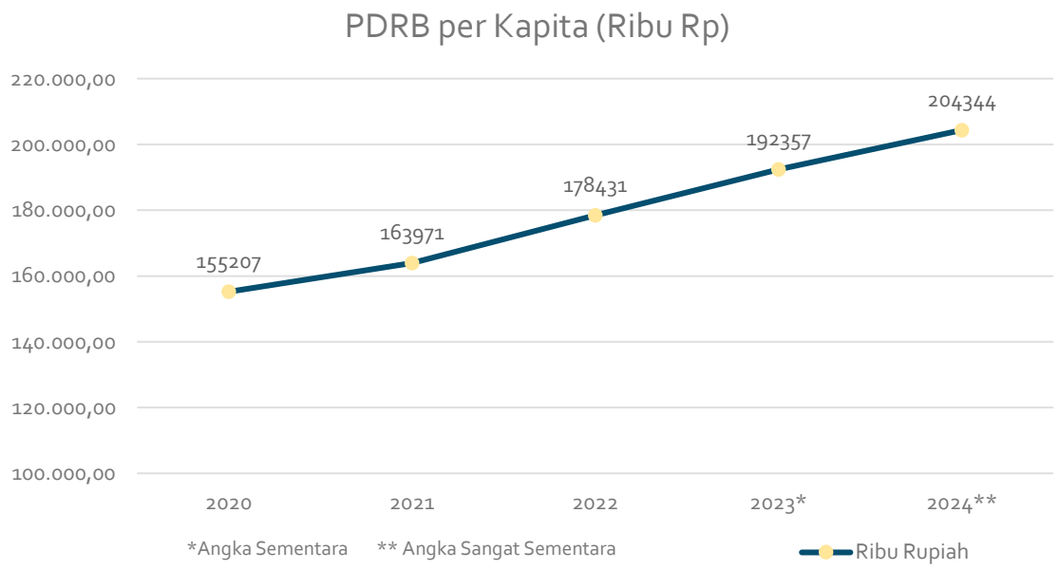
Ditinjau dari kepadatan penduduk, Jakarta Timur memiliki kepadatan penduduk yang tergolong tinggi yaitu dengan rata-rata kepadatan melebihi 20.000 jiwa per kilometer persegi, khususnya di Kecamatan-Kecamatan padat seperti Kecamatan Matraman, Jatinegara, dan Kramat Jati. Hal ini terjadi karena ketiga wilayah tersebut memiliki lokasi yang strategis dengan akses mudah ke pusat Kota Jakarta. Kepadatan penduduk berdasarkan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar II.4.



Gambar II.4 Diagram Perbandingan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Sumber: BPS Kota Jakarta Timur, 2025

C. Profil Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja Kesejahteraan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur dapat tercermin dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang merupakan gambaran rata-rata produk per penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Besarnya PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh nilai PDRB dan jumlah penduduk. Gambar II.5 menunjukkan bahwa pada Tahun 2020–2024 nilai PDRB per kapita Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki kecenderungan positif seiring dengan peningkatan nilai ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Secara rata-rata nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Jakarta sebesar 285,4 juta rupiah per tahun.

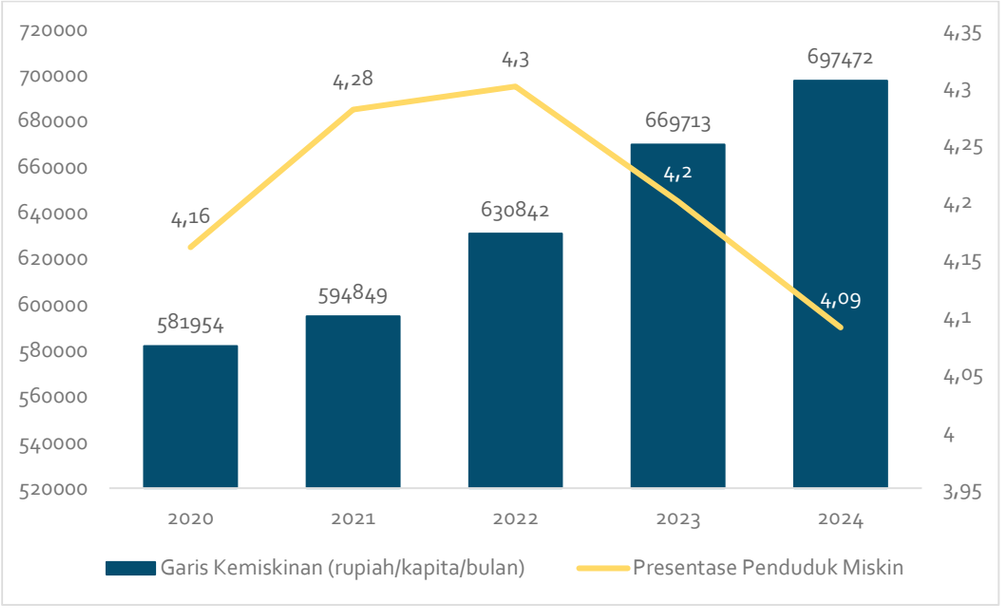


Gambar II.5 Nilai PDRB per Kapita Tahun 2020–2024
Sumber: BPS Kota Jakarta Timur, 2021–2024

Pada Tahun 2020, nilai PDRB per kapita Kota Administrasi Jakarta Timur tercatat sekitar Rp155 juta, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp165 juta pada 2021. Kenaikan ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya, mencapai Rp178 juta pada Tahun 2022, Rp192 juta pada Tahun 2023, dan diperkirakan mencapai sekitar Rp207 juta pada Tahun 2024. Dengan sektor utama dalam kontribusi pertumbuhan terbesar PDRB di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sektor Industri Pengolahan. Pertumbuhan nilai PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, kontribusi ekonomi per penduduk terus meningkat yang merupakan indikator penting dalam peningkatan daya beli, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat tingkat kemiskinan yang diidentifikasikan dengan metode perhitungan Garis Kemiskinan (GK). Terdapat 2 (dua) komponen utama dalam perhitungan Garis Kemiskinan (GK) yaitu Garis

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM mencerminkan nilai minimum pengeluaran untuk kebutuhan pangan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sementara GKNM mencakup kebutuhan dasar lainnya seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Informasi mengenai GK dan persentase penduduk miskin di Jakarta Timur Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Gambar II.6 di bawah ini.



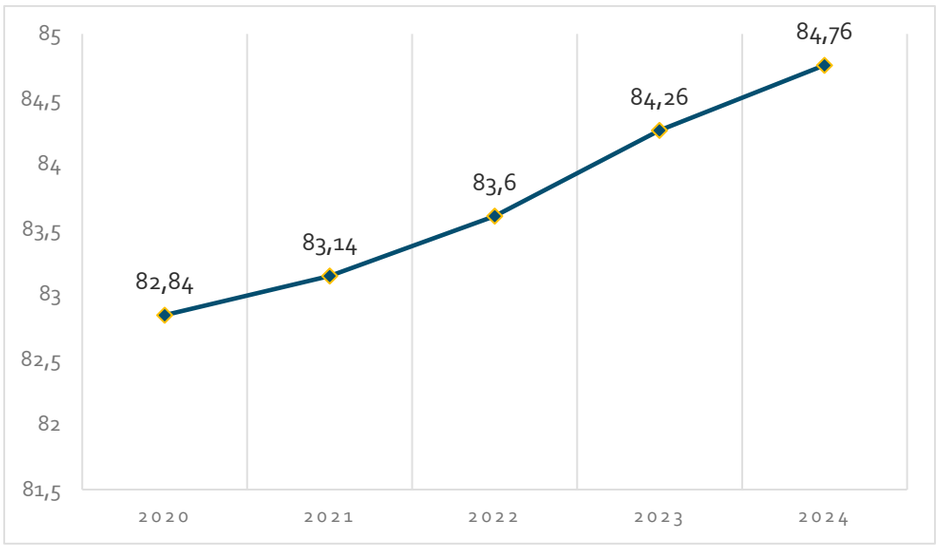
Gambar II.6 Diagram Garis kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020–2024
Sumber: BPS Kota Jakarta Timur, 2021–2025 (diolah)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kota Administrasi Jakarta Timur, Garis Kemiskinan pada periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan. Hal tersebut mencerminkan adanya eskalasi harga kebutuhan pokok dan biaya hidup secara umum, serta penyesuaian terhadap standar minimum konsumsi masyarakat yang digunakan sebagai indikator kemiskinan. Di sisi lain, persentase penduduk miskin menunjukkan dinamika yang berbeda, dengan kecenderungan penurunan selama periode yang sama. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat serta efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah.

Meskipun secara umum terjadi penurunan persentase penduduk miskin, pada Tahun 2020 tercatat lonjakan signifikan yang erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Seiring dengan implementasi berbagai program pemulihan ekonomi, grafik penurunan mulai terlihat kembali. Pada Tahun 2022, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 4,3 persen, dan terus menurun hingga mencapai 4,09 persen pada Tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa dampak ekonomi dari pandemi masih dirasakan, khususnya dalam proses pemulihan kesejahteraan kelompok masyarakat yang

paling rentan. Secara keseluruhan, meskipun Garis Kemiskinan mengalami peningkatan secara nominal akibat tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, dinamika sosial ekonomi di Jakarta Timur masih sangat dipengaruhi oleh krisis ekonomi global serta efektivitas respons kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama yaitu kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita). IPM di Kota Administrasi Jakarta Timur menunjukkan kecenderungan positif selama periode 2020–2024. Lebih lanjut dapat melihat Gambar II.7 terkait dengan IPM Kota Jakarta Timur Tahun 2020–2025 :

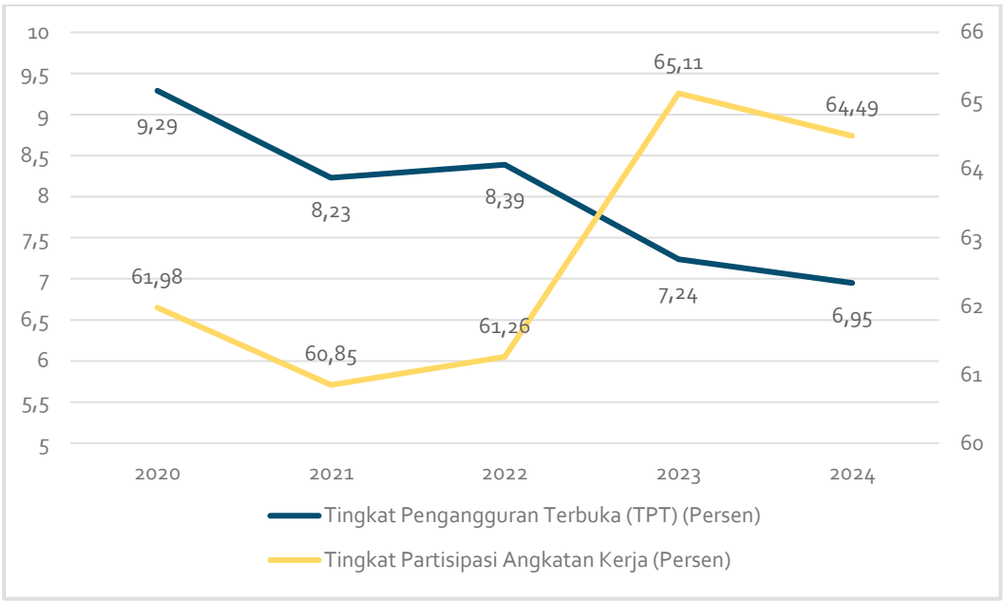


Gambar II.7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Administrasi Jakarta timur Tahun 2020–2024
Sumber: BPS Kota Jakarta Timur, 2025

Berdasarkan data dari BPS Kota Administrasi Jakarta Timur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kecenderungan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, IPM Jakarta Timur tercatat sebesar 82,84 dan terus mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 84,59 pada tahun 2024. Capaian tersebut menempatkan Jakarta Timur di atas rata-rata IPM Provinsi DKI Jakarta, yang pada Tahun 2024 berada pada angka 84,15. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan Jakarta Timur dalam mendorong pembangunan manusia, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Kondisi ketenagakerjaan merupakan salah satu determinan utama dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi mencerminkan terbatasnya akses penduduk terhadap kesempatan

kerja yang layak, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Penurunan TPT dan peningkatan TPAK merupakan indikator positif yang menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang memperoleh pekerjaan dan penghasilan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja yang produktif dan perluasan partisipasi angkatan kerja menjadi strategi kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan serta mendorong pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan



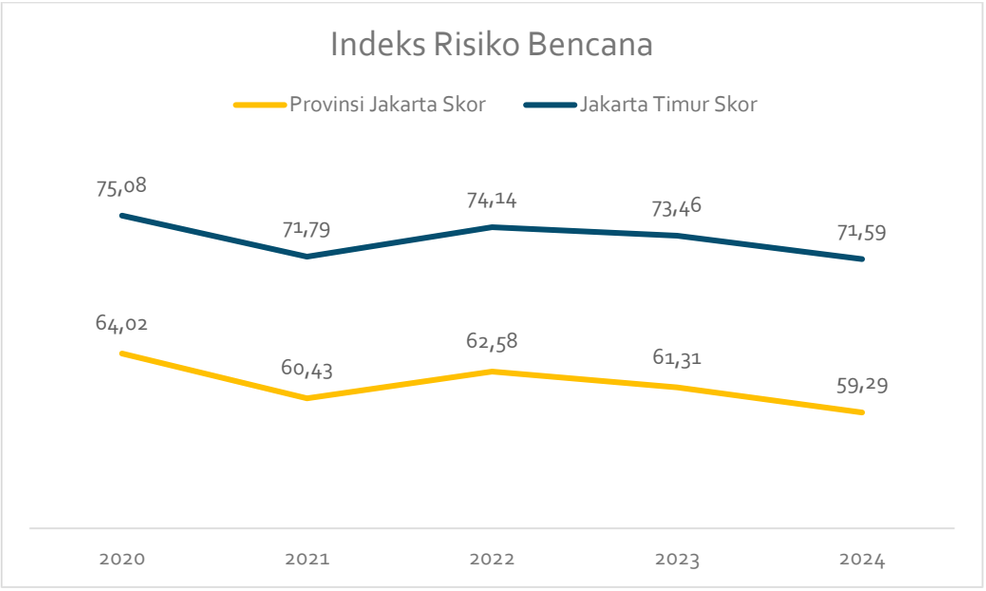
Gambar II.8 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Sumber: BPS Kota Jakarta Timur, 2025

Dilihat dari grafik Gambar II.8 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan pada ketenagakerjaan di Kota Administrasi Jakarta Timur. TPT mengalami fluktuasi, dimulai dari 9,29% pada Tahun 2020, kemudian menurun secara bertahap menjadi 6,95% pada Tahun 2024. Penurunan ini dicerminkan adanya pemulihan kondisi ketenagakerjaan pasca pandemi COVID-19, seiring dengan mulai mengikatnya aktivitas ekonomi. Sama halnya dengan persentase TPAK yang menunjukkan kecenderungan yang variatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang kembali aktif dalam pasar tenaga kerja.

Pergerakan TPT dan TPAK ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi pasar kerja di Jakarta Timur dalam lima tahun terakhir. Penurunan angka pengangguran disertai peningkatan partisipasi angkatan kerja menandakan bahwa kebijakan ketenagakerjaan, pelatihan, serta program pemulihan ekonomi yang dilakukan telah memberikan dampak positif.

D. Profil Resiliensi Terhadap Bencana

Bencana menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan dan pembangunan kota. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) untuk melakukan penilaian terhadap tingkat risiko bencana di setiap wilayah Provinsi. IRBI yang diterbitkan oleh BNPB dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu, komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. Selanjutnya disajikan tingkat risiko bencana untuk memberikan gambaran umum terkait dengan kecenderungan bencana yang terjadi sehingga dapat menjadi acuan dalam melihat risiko bencana di masa depan. Kecenderungan IRBI di Wilayah Jakarta Timur dari Tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar II.9 Grafik Indeks Risiko Bencana Provinsi Jakarta dan Kota Administrasi Jakarta Timur
Sumber: BNPB, 2024

Nilai IRB Provinsi DKI Jakarta menurun secara konsisten dari 64,02 pada Tahun 2020 menjadi 59,29 pada Tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas mitigasi serta perbaikan sistem penanggulangan bencana di tingkat Provinsi. Namun demikian, wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur masih mencatat nilai IRB yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi, meski juga mengalami penurunan dari 75,08 menjadi 71,59 pada periode yang sama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Jakarta Timur memiliki tingkat kerentanan bencana yang relatif lebih besar, khususnya terhadap risiko banjir. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi yang lebih intensif dan terfokus di wilayah Jakarta Timur, termasuk penguatan infrastruktur pengendalian banjir, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta integrasi kebijakan tata ruang yang adaptif.

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023–2027 Jakarta terdapat 9 (sembilan) jenis ancaman bencana alam, antara lain banjir, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrem, kegagalan teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Selain itu, terdapat 1 (satu) jenis ancaman bencana non alam, yaitu kebakaran wilayah perkotaan sehingga secara total terdapat 10 (sepuluh) jenis ancaman bencana yang dapat terjadi di wilayah Jakarta Timur. Rangkuman potensi risiko bencana di Jakarta Timur dapat dilihat pada Tabel II.3.

Tabel II.3 Rekapitulasi Tingkat Risiko Bencana di Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Jenis Bencana	Tingkat Risiko Bencana
1.	Banjir	Sedang
2.	Gempa Bumi	Sedang
3.	Likuefaksi	Rendah
4.	Tsunami	-
5.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-
6.	Kekeringan	Sedang
7.	Cuaca Ekstrem	Rendah
8.	Kegagalan Teknologi	Sedang
9.	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah
10.	Kebakaran Wilayah Perkotaan	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana DKI Jakarta 2022–2026, 2024 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel II.3 IRB di Kota Administrasi Jakarta Timur menunjukkan variasi berdasarkan jenis ancaman. Pada kategori risiko rendah, terdapat tiga jenis bencana yang perlu diwaspadai, yaitu likuefaksi, cuaca ekstrem, serta epidemi dan wabah penyakit. Meskipun tergolong rendah, ketiga jenis ancaman tersebut tetap memerlukan perhatian khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mengingat potensi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan stabilitas lingkungan perkotaan. Sementara itu, kategori risiko sedang mencakup bencana banjir, gempa bumi, kekeringan, kegagalan teknologi, dan kebakaran di wilayah perkotaan. Ancaman-ancaman ini memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dan memerlukan strategi mitigasi yang komprehensif, termasuk penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.

II.1.2. Tugas, fungsi dan struktur Kota Administrasi Jakarta Timur

Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja, Kota Administrasi Jakarta Timur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

A. Tugas

Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

Kota Administrasi Jakarta Timur dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Walikota dan Wakil Walikota didukung oleh perangkat pemerintahan seperti Sekretariat Kota, Suku Dinas, Lembaga Teknis, serta Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi ujung tombak pelayanan publik. Sebagai salah satu unsur pembantu Gubernur, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki tugas, sebagai berikut:

1. Memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi Jakarta timur; dan
5. Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur.

B. Fungsi

Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
4. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
7. Pengoordinasian pemilihan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
10. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
11. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
12. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah administrasi;
13. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
14. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
15. Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
16. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
17. Pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;
18. Fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang terutang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD**;**
19. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
20. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

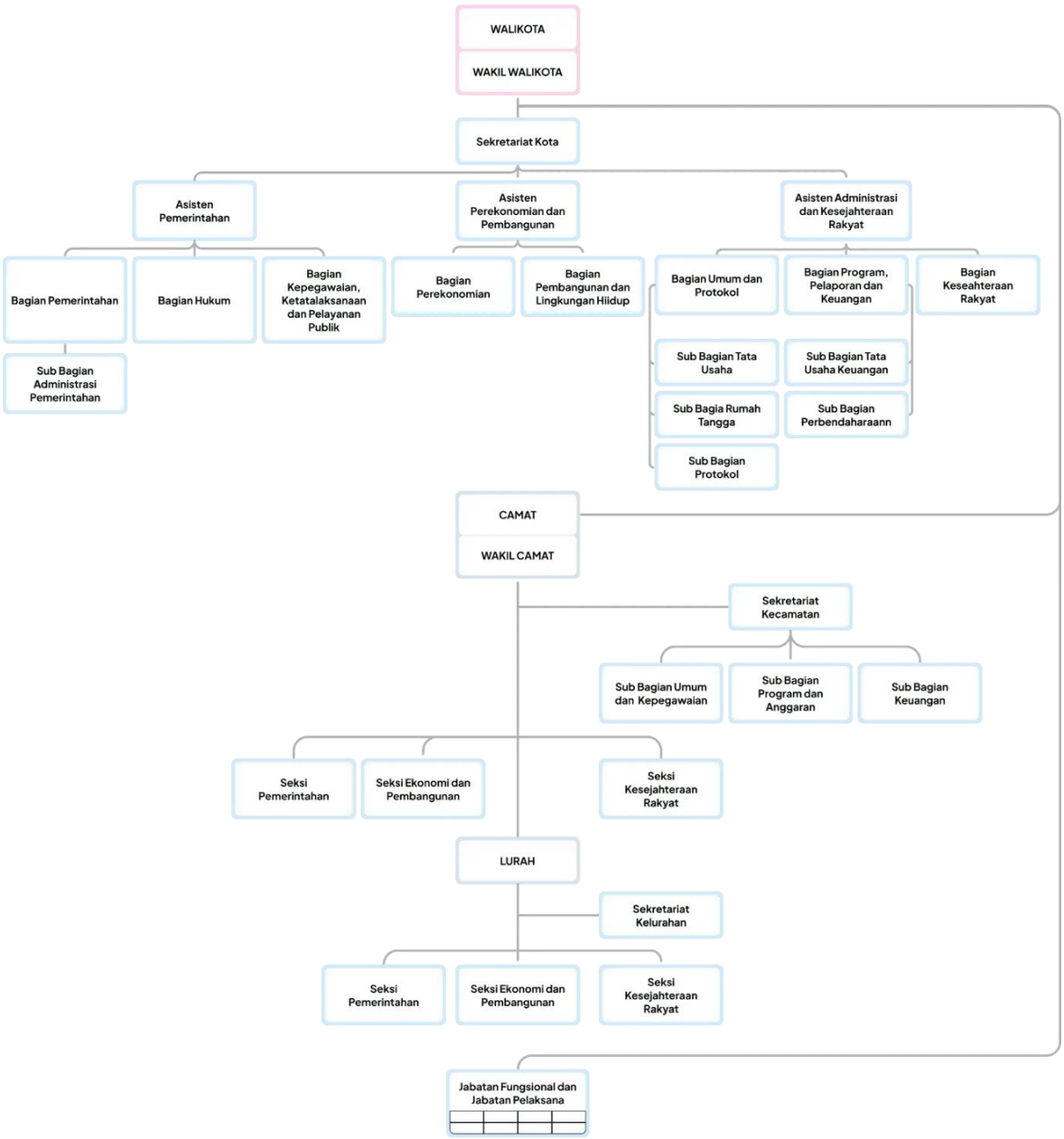
Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kota Administrasi melaksanakan fungsi tambahan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di Wilayah Kelurahan;

2. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
3. Fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
4. Fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerimaan manfaat Kartu Jakarta Pintar;
5. Fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
6. Fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
7. Fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

C. Struktur Perangkat Daerah

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Kota Administrasi dapat dilihat pada Gambar II.10 di bawah ini.



Gambar II.10 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Kota Administrasi Jakarta Timur
Sumber: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, 2022

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, tingkat Kota Administrasi mengalami penyederhanaan Jabatan Administrasi pada level jabatan Pengawas dimana sebanyak 17 jabatan Pengawas menjadi jabatan Fungsional yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.4 Penyederhanaan Jabatan Administrasi pada Level Jabatan Pengawas Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Nama Jabatan Sebelum Penyederhanaan	Nama Jabatan Setelah Penyederhanaan
1	Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan	Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Bina Pemerintahan
2	Kepala Sub Bagian Tata Praja	Analis Kebijakan Kepala Subbagian Tata Praja
3	Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum	Analis Hukum Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Pelayanan Hukum
4	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	Analis Hukum Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Bantuan Hukum
5	Kepala Sub Bagian Publikasi Hukum dan Ham	Analis Hukum Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Publikasi Hukum
6	Kepala Subbagian Kepegawaian	Analis Kepegawaian Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Kepegawaian
7	Kepala Subbagian Tatalaksana	Analis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Tata Laksana
8	Kepala Subbagian Pelayanan Publik	Analis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Pelayanan Publik
9	Kepala Subbagian Pariwisata, Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Analis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Pariwisata, Pangan, Kelautan Dan Pertanian
10	Kepala Subbagian Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Analis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
11	Kepala Subbagian Perhubungan dan Tenaga Kerja	Analis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Perhubungan Dan Tenaga Kerja
12	Kepala Subbagian Pekerjaan Umum	Analis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Pekerjaan Umum
13	Kepala Subbagian Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan	Analis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan
14	Kepala Subbagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Analis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Lingkungan Hidup Dan Ruang Terbuka Hijau
15	Kepala Subbagian Program Dan Anggaran Perencana	Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Program Dan Anggaran
16	Kepala Subbagian Sosial, Olahraga, Perpustakaan Dan Kearsipan	Analis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Sosial, Olahraga, Perpustakaan Dan Kearsipan
17	Kepala Subbagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual	Analis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Pendidikan, Kebudayaan Dan Mental Spiritual
18	Kepala Subbagian Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Analis Kebijakan Ahli Muda, Selaku Subkoordinator Urusan Kesehatan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk

Sumber: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

II.1.3. Sumber daya Kota Administrasi Jakarta Timur

A. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Tahun 2025, jumlah pegawai di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 814 orang dengan profil sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel II.5 di bawah ini, jumlah pegawai Kota Administrasi Jakarta Timur paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 241 orang (30 persen). Selanjutnya urutan kelompok umur dengan komposisi jumlah pegawai terbanyak adalah kelompok umur 36–40 tahun sebanyak 188 orang (23 persen), kelompok umur 41–45 tahun sebanyak 152 orang (19 persen), kelompok umur 46–50 tahun sebanyak 152 orang (15 persen), kelompok umur 31–35 tahun sebanyak 53 orang (7 persen), serta kelompok umur 26–30 tahun sebanyak 43 orang (5 persen). Adapun kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah kelompok umur 20–25 tahun, yaitu sebanyak 12 orang (1 persen). Berdasarkan penjelasan tersebut yang perlu diantisipasi adalah banyaknya pegawai di umur lebih dari 50 tahun yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.

Tabel II.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20–25	26–30	31–35	36–40	41–45	46–50	>50	
1.	Sekretariat Kota Adm. Jakarta Timur	3	11	12	33	12	12	33	116
2.	Kecamatan Cakung	1	4	4	17	21	11	21	79
3.	Kecamatan Cipayung	1	4	8	22	14	9	40	98
4.	Kecamatan Ciracas	0	3	7	18	4	8	18	58
5.	Kecamatan Duren Sawit	2	5	6	12	13	11	23	72
6.	Kecamatan Jatinegara	1	3	4	15	26	15	8	72
7.	Kecamatan Kramat Jati	0	4	2	12	13	17	20	68
8.	Kecamatan Makasar	0	2	2	14	7	11	11	47
9.	Kecamatan Matraman	1	1	1	11	16	13	15	58
10.	Kecamatan Pasar Rebo	0	2	6	16	12	5	24	65
11.	Kecamatan Pulo Gadung	3	4	1	18	14	13	28	81
Total		**12**	**43**	**53**	**188**	**152**	**125**	**241**	**814**

Sumber: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel II.6 komposisi pegawai di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 632 orang atau sebesar 77,64 persen, dari total keseluruhan. Selanjutnya, pegawai yang menempati Golongan IV berjumlah 92 orang (11,30 persen), diikuti oleh Golongan II sebanyak 87 orang (10,69 persen). Adapun pegawai yang berada pada Golongan I tercatat sebanyak 3 orang atau sebesar 0,37 persen.

Tabel II.6 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat Kota Adm. Jakarta Timur	1	5	87	23	116
2.	Kecamatan Cakung	0	11	64	4	79
3.	Kecamatan Cipayung	0	9	81	8	98
4.	Kecamatan Ciracas	1	8	43	6	58
5.	Kecamatan Duren Sawit	0	6	57	9	72
6.	Kecamatan Jatinegara	0	11	56	5	72
7.	Kecamatan Kramat Jati	1	6	55	6	68
8.	Kecamatan Makasar	0	2	37	8	47
9.	Kecamatan Matraman	0	11	38	9	58
10.	Kecamatan Pasar Rebo	0	9	50	6	65
11.	Kecamatan Pulo Gadung	0	9	64	8	81
TOTAL		**3**	**87**	**632**	**92**	**814**

Sumber: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 397 orang atau sebesar 48,77 persen dari total keseluruhan. Selanjutnya, sebanyak 158 orang (19,53 persen) memiliki pendidikan Diploma III (DIII), dan 111 orang (13,64 persen) merupakan lulusan Strata 2 (S2). Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatat sebanyak 96 orang (11,79 persen), sementara lulusan Diploma IV (DIV) berjumlah 45 orang (5,53 persen). Adapun pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana Ilmu (SI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masing-masing berjumlah 2 orang (0,25 persen), serta lulusan Diploma I (D1) dan Sekolah Dasar (SD) masing-masing sebanyak 1 orang (0,12 persen). Tidak terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan Diploma II (DII) dalam struktur kepegawaian saat ini.

Tabel II.7 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan										Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1.	Sekretariat Kota Adm. Jakarta Timur	0	1	7	0	0	12	13	56	26	1	116
2.	Kecamatan Cakung	0	0	12	0	0	21	4	36	6	0	79
3.	Kecamatan Cipayung	0	0	10	1	0	17	4	49	17	0	98
4.	Kecamatan Ciracas	1	0	8	0	0	14	0	24	11	0	58
5.	Kecamatan Duren Sawit	0	0	4	0	0	16	6	39	7	0	72
6.	Kecamatan Jatinegara	0	0	11	0	0	14	4	37	6	0	72
7.	Kecamatan Kramat Jati	0	1	5	0	0	14	2	41	5	0	68
8.	Kecamatan Makasar	0	0	5	0	0	10	2	20	10	0	47
9.	Kecamatan Matraman	0	0	11	0	0	5	3	31	8	0	58
10.	Kecamatan Pasar Rebo	0	0	9	0	0	15	1	30	9	1	65
11.	Kecamatan Pulo Gadung	0	0	14	0	0	21	6	34	6	0	81
TOTAL		**1**	**2**	**96**	**1**	**0**	**159**	**45**	**397**	**111**	**2**	**814**

Sumber: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Dapat disimpulkan bahwa pegawai Kota Administrasi Jakarta Timur didominasi oleh mereka yang berpendidikan S2, S1, DVI dan SMA yaitu sebanyak 93,73 persen, sehingga secara umum dapat dikatakan tingkat pendidikan pegawai Kota Administrasi Jakarta Timur sudah memadai.

4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur, yang mencakup unit kerja di tingkat Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural tercatat sebanyak 343 orang. Jabatan-jabatan tersebut tersebar di seluruh tingkatan pemerintahan wilayah. Berdasarkan Tabel II.8, komposisi pegawai menurut jenis jabatan menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada dalam jabatan fungsional pelaksana, yaitu sebanyak 454 orang atau sebesar 55,77 persen. Selanjutnya, pegawai yang menduduki jabatan Eselon IV berjumlah 313 orang (38,45 persen), diikuti oleh Eselon III sebanyak 27 orang (3,32 persen), dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 17 orang (2,09 persen). Adapun pegawai yang menempati jabatan Eselon II tercatat sebanyak 3 orang (0,37 persen). Informasi lebih rinci mengenai

jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada Tabel II.6 berikut.

Tabel II.8 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Unit Kerja	Jabatan					Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu	Fungsional Pelaksana	
1.	Sekretariat Kota Adm. Jakarta Timur	3	7	6	17	83	116
2.	Kecamatan Cakung	0	1	35	0	43	79
3.	Kecamatan Cipayung	0	1	38	0	59	98
4.	Kecamatan Ciracas	0	2	24	0	32	58
5.	Kecamatan Duren Sawit	0	3	32	0	37	72
6.	Kecamatan Jatinegara	0	1	35	0	36	72
7.	Kecamatan Kramat Jati	0	1	30	0	37	68
8.	Kecamatan Makasar	0	2	23	0	22	47
9.	Kecamatan Matraman	0	3	29	0	26	58
10.	Kecamatan Pasar Rebo	0	3	26	0	36	65
11.	Kecamatan Pulo Gadung	0	3	35	0	43	81
TOTAL		**3**	**27**	**313**	**17**	**454**	**814**

Sumber: Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

B. Aset atau Modal

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, selain didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, keberadaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan faktor yang sangat penting. Pemerintahan yang efektif dan efisien tidak hanya bergantung pada kualitas sumber daya manusia, tetapi juga pada ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung operasional.

Kota Administrasi Jakarta Timur saat ini memiliki aset fisik yang antara lain mencakup tanah dan bangunan Gedung Kantor Walikota, 10 Kantor Kecamatan, dan 65 Kantor Kelurahan, serta Rumah Dinas bagi Walikota, para Camat, dan para Lurah. Sarana dan prasarana tersebut berfungsi sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan pelayanan publik

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur secara umum telah mencukupi kebutuhan pelayanan. Namun demikian, dari aspek kualitas, beberapa fasilitas tercatat dalam kondisi kurang layak hingga tidak layak untuk digunakan. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan rutin, perbaikan sesuai tingkat kerusakan, serta penghapusan dan pengadaan aset baru guna memastikan kelancaran dan peningkatan mutu pelayanan.

Berdasarkan Tabel II.9 di bawah ini, aset bangunan yang dimiliki Kantor Walikota Jakarta Timur terdiri atas beberapa gedung utama dan bangunan penunjang dengan luas dan fungsi yang beragam. Gedung Walikota terbagi dalam beberapa blok, yakni Blok A, B1, B2, C, dan D, dengan kondisi fisik secara umum dalam kategori rusak ringan. Selain gedung utama, terdapat bangunan penunjang yaitu bangunan olahraga terbuka permanen, taman permanen, gedung pertemuan permanen, serta bangunan parkir tertutup permanen. Beberapa bangunan tersebut tercatat dengan kondisi beragam yaitu rusak ringan hingga rusak berat. Selanjutnya, Tabel II.10 menyajikan data Rumah Dinas Walikota Jakarta Timur yang telah direnovasi pada Tahun 2023. Rumah Dinas Walikota tetap memerlukan perhatian dalam aspek pemeliharaan agar dapat berfungsi optimal sebagai fasilitas penunjang bagi kepala daerah.

Secara keseluruhan, aset bangunan kantor dan rumah dinas Walikota Jakarta Timur mencerminkan dukungan infrastruktur yang cukup memadai untuk penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, beberapa di antaranya mengalami kerusakan, diperlukan upaya rehabilitasi dan perawatan berkala untuk menjamin keberlanjutan fungsi pelayanan serta kenyamanan lingkungan kerja.

Tabel II.9 Aset/Modal Bangunan di Kantor Walikota Jakarta Timur

NO.	NAMA GEDUNG	LUAS LAHAN (M²)	BLOK	LUAS BANGUNAN (M²)	JUMLAH LANTAI	TAHUN PEMBANGUNAN	KONDISI FISIK			
							RB	RS	RR	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Gedung Walikota	2.437	A	18.888	8	1989	-	-	√	-
2.	Gedung Walikota	2.026	B1	8.407	3	2003	-	-	√	-
3.	Gedung Walikota	2.026	B2	8.15	3	2003	-	-	√	-
4.	Gedung Walikota	774	C	2.299	2	2010	-	-	√	-
5.	Gedung Walikota	1.722	D	21.64	16	2006	-	-	√	-
6.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	400	-	400	-	1979	√	-	-	-
7.	Taman Permanen	2.414	-	2.414	-	2010	√	-	-	-
8.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	200	-	200	-	2011	√	-	-	-
9.	Bangunan Parkir Tertutup Permanen	1.000	-	1.000	-	2013	-	√	-	-

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Tabel II.10 Rumah Dinas Walikota Jakarta Timur

NO.	LUAS LAHAN (M²)	ALAMAT	LUAS BANGUNAN (M²)	JUMLAH LANTAI	TAHUN PEMBANGUNAN	TAHUN RENOVASI TERAKHIR	KONDISI FISIK		
							RB	RS	RR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	814	Jalan Taman Simanjuntak Timur No.11, RT.11/RW.3, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara	360	1	1979	2023	-	-	√

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Pada Tabel II.12 menampilkan data mengenai bangunan kantor Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dari aspek kondisi bangunan, mayoritas kantor Kecamatan dalam kondisi baik. Namun demikian, terdapat satu kantor Kecamatan di Kecamatan Kramat Jati yang tercatat mengalami kerusakan ringan, sedangkan 9 (sembilan) kantor Kecamatan lainnya masih dalam kondisi layak dan berfungsi optimal.

Selanjutnya, pada Tabel II.13 menyajikan data mengenai kondisi Rumah Dinas Camat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Secara umum, Rumah Dinas Camat tersebar di berbagai lokasi strategis dengan luas tanah yang bervariasi antara 270 m² hingga 800 m². Berdasarkan tahun pembangunan, rumah dinas tersebut sebagian besar dibangun pada periode 1980-an hingga 1990-an. Rumah Dinas pertama yang dibangun adalah Rumah Dinas Camat Kramat Jati yang dibangun pada Tahun 1985, sedangkan Rumah Dinas terakhir yang dibangun adalah Rumah Dinas Makasar yaitu pada Tahun 1995.

Dari aspek kondisi bangunan, terdapat variasi kondisi Rumah Dinas yaitu dari kondisi baik hingga kondisi kerusakan ringan, sedang dan berat. Rumah Dinas yang tercatat dalam kondisi baik sebanyak 3 rumah (30 persen) yaitu rumah Dinas Camat Duren Sawit, Camat Cipayung dan Camat Matraman. Sementara itu, Rumah Dinas dengan kondisi rusak sedang sebanyak 2 Rumah Dinas (20 persen) yaitu Camat Makasar dan Camat Pulogadung, sedangkan Rumah Dinas dengan kondisi rusakan ringan terdapat 3 Rumah Dinas (30 persen) yaitu Rumah Dinas Camat Cakung, Camat Pasar Rebo, Camat Jatinegara, dan Camat Ciracas. Adapun Rumah Dinas dengan kondisi rusak berat sebanyak 2 (20 persen) terdapat di Camat Kramat Jati dan Camat Duren Sawit.

Data ini menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan dan Rumah Dinas Camat di Jakarta Timur memerlukan perhatian dalam bentuk pemeliharaan maupun rehabilitasi, khususnya untuk rumah dinas yang sudah mengalami kerusakan. Upaya peningkatan kualitas kantor dan rumah dinas Camat menjadi penting untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.11 Bangunan Kantor Camat Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kecamatan	Alamat Kantor	Luas Tanah Kantor (m^2)	Jumlah Lantai Kantor	Tahun Kantor Dibangun	Kartu Inventaris Barang (KIB)	Kondisi Kantor Camat
1.	Cakung	Jalan Raya Bekasi KM 23	6.450	4	2005	Sudah Tercatat di KIB	Baik
2.	Pasar Rebo	Jalan Raya Bogor KM 27, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur	2.968	4	2005	Sudah Tercatat di KIB	Baik
3.	Duren Sawit	Jalan Swadaya VIII Nomor 1, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit	3.055	4	2013	Sudah Tercatat di KIB	Baik
4.	Makasar	Jalan Lembur Nomor 1, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar	3.654	4	2014	Sudah Tercatat di KIB	Baik
5.	Cipayung	Jalan Bina Marga Nomor 2 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur	6.000	4	2014	Sudah Tercatat di KIB	Baik
6.	Kramat Jati	Jalan Raya Bogor Km. 20, Jakarta Timur	2.391	4	2003	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
7.	Matraman	Jalan Balai Rakyat, Kelurahan Utan Kayu Utara	2.161	4	2005	Sudah Tercatat di KIB	Baik
8.	Ciracas	Jalan Penganten Ali Nomor 9	3.628	4	2016	Sudah Tercatat di KIB	Baik
9.	Jatinegara	Jalan DI. Panjaitan, RT 013 RW 001, Kelurahan Cipinang Cempedak	6.846	4	2012	Sudah Tercatat di KIB	Baik
10.	Pulogadung	Jalan Raya Bekasi KM. 18, Kelurahan Jatinegara Kaum	4.810	4	2004	Sudah Tercatat di KIB	Baik

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Tabel II.12 Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kecamatan	Alamat Rumah Dinas	Luas Tanah Rumah Dinas (m^2)	Tahun Rumah Dinas Dibangun	Kondisi Rumah Dinas Camat
1.	Cakung	Jalan Raya Bekasi KM 23	270	1999	Rusak Ringan
2.	Pasar Rebo	Jalan Kalisari III, RT 008 RW 010, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur	500	1997	Rusak Ringan
3.	Duren Sawit	Jalan Swadaya Raya, RT 08 RW 05, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit	492	2008	Baik
4.	Makasar	Jalan Jengki Nomor 1D, RT 004 RW 09	399	1994	Rusak Sedang
5.	Cipayung	Jalan Raya Cilangkap, RT 004 RW 001, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung	800	1993	Baik
6.	Kramat Jati	Jalan Dato Tonggara, RT 014 RW 11, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati	292	1985	Rusak Berat
7.	Matraman	Jalan Kebon Kelapa, Kelurahan Utan Kayu selatan	162	1995	Baik
8.	Ciracas	Jalan Lapangan Tembak Nomor 12	399	1990	Rusak Berat
9.	Jatinegara	Jalan K 1 Nomor 2A, RT 011 RW 003, Kelurahan Cipinang Muara	411	1985	Rusak Ringan
10.	Pulogadung	Jalan Balai Pustaka Baru I, Kelurahan Rawamangun	436	1990	Rusak Sedang

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Data Gedung Kantor Kelurahan dan Rumah Dinas Lurah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada Tabel II.14 di bawah ini. Dari aspek kondisi gedung kantor Kelurahan mayoritas dalam kondisi baik yaitu 42 gedung kantor atau setara 64,62 persen dalam kondisi baik. Namun demikian, masih terdapat 16 kantor (24,62 persen) yang mengalami kerusakan ringan, 5 kantor (7,69 persen) dalam kondisi rusak sedang dan 2 gedung kantor (3,08 persen) dengan kondisi rusak berat yaitu gedung kantor Kelurahan Cakung Barat dan Kelurahan Ciracas.

Selanjutnya berdasarkan data pada Tabel II.15, Jakarta Timur telah memiliki 44 Rumah Dinas bagi para Lurah. Dengan demikian, masih terdapat 21 Lurah yang belum difasilitasi Rumah Dinas, termasuk seluruh Lurah di Kecamatan Matraman belum memiliki Rumah Dinas. Beberapa penyebab kekurangan ini yaitu adanya alih fungsi lahan dan keterbatasan lahan kosong. Dari total Rumah Dinas yang ada, 21 unit rusak berat, 9 unit rusak sedang, 7 unit rusak ringan, dan hanya 7 unit dalam kondisi baik.

Dari data yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Kantor Kelurahan dan Rumah Dinas Lurah di Jakarta Timur memerlukan perhatian terhadap penyediaan dan rehabilitasi, meski tetap diperlukan upaya pemeliharaan rutin Gedung Kantor Kelurahan yang mengalami kerusakan ringan. Data ini menggambarkan bahwa keberadaan dan kelayakan rumah dinas lurah masih menjadi tantangan, mengingat proporsi Rumah Dinas dalam kondisi rusak maupun yang belum tersedia masih cukup tinggi. Upaya peningkatan kualitas Gedung Kantor Kelurahan dan Rumah Dinas Lurah menjadi penting untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.13 Bangunan Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kecamatan	Kelurahan	Alamat Kantor	Luas Tanah Kantor (m^2)	Tahun Kantor Dibangun	Kartu Inventaris Barang (KIB)	Kondisi Kantor Lurah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kecamatan Cakung	Kelurahan Ujung Menteng	Jalan Kelurahan, RT 008 RW 01	1.200	1994	Sudah Tercatat di KIB	Baik
2.	Kecamatan Cakung	Kelurahan Cakung Barat	Jalan Tipar Cakung Pool PPD Depo C, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung	1.175	1980	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Berat
3.	Kecamatan Cakung	Kelurahan Cakung Timur	Jalan Irigasi Balai Rakyat Nomor 1	1.000	2008	Sudah Tercatat di KIB	Baik
4.	Kecamatan Cakung	Kelurahan Jatinegara	Jalan Raya Bekasi Km 18, RT 05 RW 011	739	2019	Sudah Tercatat di KIB	Baik
5.	Kecamatan Cakung	Kelurahan Penggilingan	Jalan Komplek PIK RW 10, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung	1.777	2006	Sudah Tercatat di KIB	Baik
6.	Kecamatan Cakung	Kelurahan Pulogebang	Jalan Raya Pulo Gebang, RT 006 RW 003, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung	1.160	2019	Sudah Tercatat di KIB	Baik
7.	Kecamatan Cakung	Kelurahan Rawa Terate	Jalan Dr. KRT Radjiman Widyo Diningrat, RT 002 RW 04	1.182	2012	Sudah Tercatat di KIB	Baik
8.	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Ceger	Jalan SMPN 160, RT 02 RW 05	1.080	1990	Sudah Tercatat di KIB	Baik
9.	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Pondok Ranggon	Jalan Raya Pondok Ranggon Nomor 1, RT 01 RW 04	3.055	2018	Sudah Tercatat di KIB	Baik
10.	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Munjul	Jalan Buni, RT 001 RW 004, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung	1.000	2011	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan

No.	Kecamatan	Kelurahan	Alamat Kantor	Luas Tanah Kantor (m^2)	Tahun Kantor Dibangun	Kartu Inventaris Barang (KIB)	Kondisi Kantor Lurah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Bambu Apus	Jalan Mini III, RT 012 RW 03, Kelurahan Bambu Apus	2.578	2013	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
12.	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Setu	Jalan Raya Setu, RT 005 RW 01	1.667	2011	Sudah Tercatat di KIB	Baik
13.	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Cilangkap	Jalan Assafiiyah, RT 003 RW 03	3.000	2000	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
14.	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Lubang Buaya	Jalan SPG 7, RT 06 RW 09, Kelurahan Lubang Buaya	1.500	1975	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Sedang
15.	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Cipayung	Jalan Bambu Hitam Nomor 103, RT 010 RW 04	6.325	2013	Sudah Tercatat di KIB	Baik
16.	Kecamatan Ciracas	Kelurahan Rambutan	Jalan Gudang Air Nomor 36, RT 005 RW 02, Kelurahan Rambutan	3.106	2011	Sudah Tercatat di KIB	Baik
17.	Kecamatan Ciracas	Kelurahan Susukan	Jalan H. Baping, RT 010 RW 006	2.340	2007	Sudah Tercatat di KIB	Baik
18.	Kecamatan Ciracas	Kelurahan Cibubur	Jalan Raya Lapangan Tembak, RT 05 RW 02, Kelurahan Cibubur	2.626	1999	Sudah Tercatat di KIB	Baik
19.	Kecamatan Ciracas	Kelurahan Ciracas	Jalan Raya Ciracas	4.196	2003	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Berat
20.	Kecamatan Ciracas	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	Jalan Raya PKP Nomor 1, RT 001 RW 08	1.590	2019	Sudah Tercatat di KIB	Baik
21.	Kecamatan Duren Sawit	Kelurahan Klender	Jalan Bulak Timur 1/12, RT 08 RW 016, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit	2.547	2010	Sudah Tercatat di KIB	Baik

No.	Kecamatan	Kelurahan	Alamat Kantor	Luas Tanah Kantor (m^2)	Tahun Kantor Dibangun	Kartu Inventaris Barang (KIB)	Kondisi Kantor Lurah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22.	Kecamatan Duren Sawit	Kelurahan Malaka Sari	Jalan Raya Malaka Nomor 122, RT 004 RW 008, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit	1.200	2014	Sudah Tercatat di KIB	Baik
23.	Kecamatan Duren Sawit	Kelurahan Malaka Jaya	Jalan Teratai Putih Raya Nomor 1	1.050	2002	Sudah Tercatat di KIB	Baik
24.	Kecamatan Duren Sawit	Kelurahan Pondok Bambu	Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 147, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit	4.573	2013	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
25.	Kecamatan Duren Sawit	Kelurahan Pondok Kelapa	Jalan H. Dogon Timur 1/32	902	2008	Sudah Tercatat di KIB	Baik
26.	Kecamatan Duren Sawit	Kelurahan Duren Sawit	Jalan Kelurahan Raya Nomor 1, RT 011 RW 001	4.000	2003	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
27.	Kecamatan Duren Sawit	Kelurahan Pondok Kopi	Jalan Arabika III Blok W7, RT 009 RW 006, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit	991	2016	Sudah Tercatat di KIB	Baik
28.	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Rawa Bunga	Jalan Jatinegara Timur IV	1.132	2010	Sudah Tercatat di KIB	Baik
29.	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Kampung Melayu	Jalan Kebon Pala I / 32	468	2018	Sudah Tercatat di KIB	Baik
30.	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Cipinang Besar Utara	Jalan Swadaya 2, RT 006 RW 14, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara,	2.790	1992	Sudah Tercatat di KIB	Baik
31.	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Bidara Cina	Jalan Tanjung Lengkong Nomor 30, RT 04 RW 007, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara	1.000	2013	Sudah Tercatat di KIB	Baik
32.	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Cipinang Cempedak	Jalan Panti Asuhan	6.846	2009	Sudah Tercatat di KIB	Baik

No.	Kecamatan	Kelurahan	Alamat Kantor	Luas Tanah Kantor (m^2)	Tahun Kantor Dibangun	Kartu Inventaris Barang (KIB)	Kondisi Kantor Lurah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33.	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Jalan TPU Kebon Nanas, RT 002 RW 05	2.615	2018	Belum Tercatat di KIB	Baik
34.	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Balimester	Jalan Jatinegara Barat II/19, RT 012 RW 03, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara	450	2019	Sudah Tercatat di KIB	Baik
35.	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Cipinang Muara	Jalan Cipinang Muara Raya I	1.544	2012	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
36.	Kecamatan Kramat Jati	Kelurahan Dukuh	Jalan Dukuh V, RT 007 RW 02, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati	1.145	1984	Sudah Tercatat di KIB	Baik
37.	Kecamatan Kramat Jati	Kelurahan Tengah	Jalan Masjid Al Bariyah, RT 011 RW 04	2.400	2004	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
38.	Kecamatan Kramat Jati	Kelurahan Balekambang	Jalan Gardu/Kober, RT 009 RW 02	973	2018	Sudah Tercatat di KIB	Baik
39.	Kecamatan Kramat Jati	Kelurahan Cawang	Jalan Ja'ani Nasir Nomor 7	5.617	2007	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
40.	Kecamatan Kramat Jati	Kelurahan Cililitan	Jalan Mandala V Gang Ali Sarbi II, RT 007 RW 09	1.100	2012	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
41.	Kecamatan Kramat Jati	Kelurahan Kramat Jati	Jalan Kerja Bhakti Nomor 32, RT 002 RW 010, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati	1.248	1995	Sudah Tercatat di KIB	Baik
42.	Kecamatan Kramat Jati	Kelurahan Batu Ampar	Jalan Batu Ampar II, RT 006 RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati	1.000	2012	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
43.	Kecamatan Makasar	Kelurahan Makasar	Jalan Gelanggang Olah Raga Remaja, RT 011 RW 06, Kelurahan Makasar	1.548	2003	Sudah Tercatat di KIB	Baik

No.	Kecamatan	Kelurahan	Alamat Kantor	Luas Tanah Kantor (m^2)	Tahun Kantor Dibangun	Kartu Inventaris Barang (KIB)	Kondisi Kantor Lurah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
44.	Kecamatan Makasar	Kelurahan Halim Perdanakusuma	Jalan Squadron Nomor 1A, RT 010 RW 05, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar	1.920	2001	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Sedang
45.	Kecamatan Makasar	Kelurahan Pinang Ranti	Jalan SMA Negeri 48	1.200	2008	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
46.	Kecamatan Makasar	Kelurahan Cipinang Melayu	Jalan Inspeksi Tarum Barat Nomor 1, RT 01 RW 010	2.762	2007	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
47.	Kecamatan Makasar	Kelurahan Kebon Pala	Cipinang Asem, RT 011 RW 04, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar	2.026	2009	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Sedang
48.	Kecamatan Matraman	Kelurahan Kayu Manis	Jalan Kayu Manis VIII Nomor 32	752	2018	Sudah Tercatat di KIB	Baik
49.	Kecamatan Matraman	Kelurahan Palmeriam	Jalan Kayu Manis I Lama	756	1996	Sudah Tercatat di KIB	Baik
50.	Kecamatan Matraman	Kelurahan Kebon Manggis	Jalan Kebon Manggis 1, RT 001 RW 002, Kelurahan Kebon Manggis	1.500	2013	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
51.	Kecamatan Matraman	Kelurahan Utan Kayu Utara	Jalan kemuning Nomor 42	903	2014	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
52.	Kecamatan Matraman	Kelurahan Pisangan Baru	Jalan Pisangan Baru Utara, RT 008 RW 014, Kelurahan Pisangan Baru	935	1991	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
53.	Kecamatan Matraman	Kelurahan Utan Kayu Selatan	Jalan Galur Sari Timur Nomor 1	1.362	2013	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Ringan
54.	Kecamatan Pasar Rebo	Kelurahan Kalisari	Jalan Kalisari, RT 011 RW 02, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo	894	2013	Sudah Tercatat di KIB	Baik

No.	Kecamatan	Kelurahan	Alamat Kantor	Luas Tanah Kantor (m^2)	Tahun Kantor Dibangun	Kartu Inventaris Barang (KIB)	Kondisi Kantor Lurah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
55.	Kecamatan Pasar Rebo	Kelurahan Pekayon	Jalan Madrasah, RT 003 RW 09 Kelurahan Pekayon	2.333	2006	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Sedang
56.	Kecamatan Pasar Rebo	Kelurahan Cijantung	Jalan Gongseng Raya Nomor 88, RT 001 RW 010, Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo	3.873	2010	Sudah Tercatat di KIB	Baik
57.	Kecamatan Pasar Rebo	Kelurahan Baru	Jalan Puskesmas, RT 008 RW 01	1.478	2009	Sudah Tercatat di KIB	Baik
58.	Kecamatan Pasar Rebo	Kelurahan Gedong	Jalan H. Taiman Nomor 20, RT 02 RW 09, Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo	1.255	1997	Sudah Tercatat di KIB	Baik
59.	Kecamatan Pulogadung	Kelurahan Rawamangun	Jalan Rawamangun Muka Barat Nomor 3	1.610	2009	Sudah Tercatat di KIB	Baik
60.	Kecamatan Pulogadung	Kelurahan Pulogadung	Jalan Kayu Putih IV, RT 003 RW 06, Kelurahan Pulogadung	995	2019	Sudah Tercatat di KIB	Baik
61.	Kecamatan Pulogadung	Kelurahan Jati	Jalan Perhubungan Raya Nomor 79c, RT 001 RW 07, Kelurahan Jati	1.008	2001	Sudah Tercatat di KIB	Rusak Sedang
62.	Kecamatan Pulogadung	Kelurahan Jatinegara Kaum	Jalan TB Badaruddin Nomor 1	2.314	1999	Sudah Tercatat di KIB	Baik
63.	Kecamatan Pulogadung	Kelurahan Kayu Putih	Jalan Genteng Nomor 2, RT 03 RW 01	606	2017	Sudah Tercatat di KIB	Baik
64.	Kecamatan Pulogadung	Kelurahan Pisangan Timur	Jalan H. Mugeni II Nomor 2, Kelurahan Pisangan Timur	1.000	1996	Sudah Tercatat di KIB	Baik
65.	Kecamatan Pulogadung	Kelurahan Cipinang	Jalan Cipinang Empang 1	1.058	2010	Sudah Tercatat di KIB	Baik

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Tabel II.14 Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kecamatan	Kelurahan	Alamat Rumah Dinas	Luas Tanah Rumah Dinas (m^2)	Tahun Rumah Dinas Dibangun	Kondisi Rumah Dinas Lurah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kecamatan Cakung	Kelurahan Rawa Terate	Jalan DR. KRT. Radjiman Widyodiningrat, RT 002 RW 04	182	1976	Rusak Berat	-
2	Kecamatan Cakung	Kelurahan Ujung Menteng	Jalan Kelurahan, RT 015 RW 01	100	1977	Rusak Sedang	-
3	Kecamatan Cakung	Kelurahan Cakung Barat	Jalan Inpres, RT 001 RW 07 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung	250	1980	Rusak Berat	-
4	Kecamatan Cakung	Kelurahan Cakung Timur	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-
5	Kecamatan Cakung	Kelurahan Jatinegara	Jalan Taruna II, RT 05 RW 011	180	1981	Rusak Berat	-
6	Kecamatan Cakung	Kelurahan Penggilingan	Jalan Raya Penggilingan, RT 015 RW 007, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung	165	1985	Rusak Ringan	-
7	Kecamatan Cakung	Kelurahan Pulogebang	Jalan Raya Pulo Gebang, RT 006 RW 003, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung	100	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	Rumah Dinas Sudah Dirobohkan sejak Renovasi Gedung Kantor Lurah, dengan KIB C Gedung sudah tidak ada, menyisakan KIB A tanah saja
8	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Ceger	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-

No.	Kecamatan	Kelurahan	Alamat Rumah Dinas	Luas Tanah Rumah Dinas (m²)	Tahun Rumah Dinas Dibangun	Kondisi Rumah Dinas Lurah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Pondok Ranggon	Jalan Raya Pondok Ranggon, RT 4 RW 3	307	1975	Rusak Berat	-
10	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Munjul	Gang Kapuk Nomor 5, RT 006 RW 007, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas	200	1975	Rusak Berat	-
11	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Bambu Apus	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-
12	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Setu	Jalan Damai, RT 006 RW 01	475	1975	Rusak Ringan	-
13	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Cilangkap	Jalan Cipayung Setu, RT 007 RW 04, Kelurahan Cilangkap	200	1965	Rusak Berat	-
14	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Lubang Buaya	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-
15	Kecamatan Cipayung	Kelurahan Cipayung	Jalan Pinang, RT 001 RW 04	63	1998	Rusak Ringan	-
16	Kecamatan Ciracas	Kelurahan Rambutan	Jalan H. Jenih Nomor 51, RT 012 RW 01, Kelurahan Rambutan	150	1975	Rusak Sedang	-
17	Kecamatan Ciracas	Kelurahan Susukan	Jalan Suci Gang Rudin, RT 004 RW 003	150	2008	Baik	-
18	Kecamatan Ciracas	Kelurahan Cibubur	Jalan Masjid Fathul Ghofur, RT 02 RW 04	450	1999	Baik	-
19	Kecamatan Ciracas	Kelurahan Ciracas	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-

No.	Kecamatan	Kelurahan	Alamat Rumah Dinas	Luas Tanah Rumah Dinas (m²)	Tahun Rumah Dinas Dibangun	Kondisi Rumah Dinas Lurah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Kecamatan Ciracas	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	Jalan Raya Kelapa Dua Wetan RW.06	300	1976	Baik	-
21	Kecamatan Duren Sawit	Kelurahan Klender	Jalan Pertanian Tengah RT 015 RW 02 Nomor 1, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit	171	1975	Baik	-
22	Kecamatan Duren Sawit	Kelurahan Malaka Sari	Jalan Kav DKI Blok D7 Nomor 13–14, RT 11 RW 09, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit	180	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	Tanah Kosong
23	Kecamatan Duren Sawit	Kelurahan Malaka Jaya	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-
24	Kecamatan Duren Sawit	Kelurahan Pondok Bambu	Jalan H. Mutholib, RT 04 RW 03, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit	130	1990	Rusak Sedang	-
25	Kecamatan Duren Sawit	Kelurahan Pondok Kelapa	Jalan H. Dogon Timur 1/32	300	2008	Rusak Sedang	-
26	Kecamatan Duren Sawit	Kelurahan Duren Sawit	Jalan Masjid Baiturrrahman, RT 001 RW 012	100	1977	Rusak Berat	-
27	Kecamatan Duren Sawit	Kelurahan Pondok Kopi	Jalan Bina Karya, RT 004 RW 04	400	-	Rusak Berat	-
28	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Rawa Bunga	Jalan Komplek Pendidikan	288	1983	Rusak Berat	-
29	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Kampung Melayu	Komplek Pendidikan Rawa Bunga	110	1981	Rusak Berat	-

No.	Kecamatan	Kelurahan	Alamat Rumah Dinas	Luas Tanah Rumah Dinas (m²)	Tahun Rumah Dinas Dibangun	Kondisi Rumah Dinas Lurah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Cipinang Besar Utara	Jalan Cipinang Pulo, RT 012 RW 12, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jati Negara	313	1994	Rusak Ringan	-
31	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Bidara Cina	Komplek Rumah Dinas Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara	288	2009	Baik	-
32	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Cipinang Cimpedak	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-
33	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Jalan Cipinang Pulo Maja Nomor 7, RT 015 RW 011, Kelurahan Cipinang Besar Utara	320	1995	Rusak Berat	-
34	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Balimester	Jalan Bekasi Timur	343	1980	Rusak Berat	-
35	Kecamatan Jatinegara	Kelurahan Cipinang Muara	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-
36	Kecamatan Kramat Jati	Kelurahan Dukuh	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-
37	Kecamatan Kramat Jati	Kelurahan Tengah	Jalan Merpati	1600	1972	Rusak Ringan	-
38	Kecamatan Kramat Jati	Kelurahan Balekambang	Jalan Gardu, RT 007 RW 002, Kelurahan Balekambang	887	1975	Rusak Sedang	-
39	Kecamatan Kramat Jati	Kelurahan Cawang	Jalan Jengki Cipinang A, Kelurahan Kebon Pala	253	1990	Rusak Berat	Rusak Berat diusulkan Rehab Total

No.	Kecamatan	Kelurahan	Alamat Rumah Dinas	Luas Tanah Rumah Dinas (m^2)	Tahun Rumah Dinas Dibangun	Kondisi Rumah Dinas Lurah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40	Kecamatan Kramat Jati	Kelurahan Cililitan	Jalan Olah Raga II, RT 12 RW 05	300	2005	Rusak Sedang	-
41	Kecamatan Kramat Jati	Kelurahan Kramat Jati	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	Rumah Dinas Lurah Kramat Jati sudah tidak ada saat ini menjadi Kantor Pemadam Kebakaran
42	Kecamatan Kramat Jati	Kelurahan Batu Ampar	Jalan Batu Ampar II, RT 008 RW 03	110	1999	Rusak Berat	-
43	Kecamatan Makasar	Kelurahan Makasar	Jalan Kerja Bakti, RT 01 RW 02, Kelurahan Makasar	310	2003	Baik	-
44	Kecamatan Makasar	Kelurahan Halim Perdanakusuma	Jalan Squadron Nomor 1A, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar	516	2001	Baik	-
45	Kecamatan Makasar	Kelurahan Pinang Ranti	Jalan Raya Pondok Gede, RT 008 RW 002	217	2008	Rusak Berat	-
46	Kecamatan Makasar	Kelurahan Cipinang Melayu	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-
47	Kecamatan Makasar	Kelurahan Kebon Pala	Cipinang Asem, RT 011 RW 04, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar	256	1999	Rusak Berat	-
48	Kecamatan Matraman	Kelurahan Kayu Manis	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-
49	Kecamatan Matraman	Kelurahan Palmeriam	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-

No.	Kecamatan	Kelurahan	Alamat Rumah Dinas	Luas Tanah Rumah Dinas (m²)	Tahun Rumah Dinas Dibangun	Kondisi Rumah Dinas Lurah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	Kecamatan Matraman	Kelurahan Kebon Manggis	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-
51	Kecamatan Matraman	Kelurahan Utan Kayu Utara	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-
52	Kecamatan Matraman	Kelurahan Pisangan Baru	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-
53	Kecamatan Matraman	Kelurahan Utan Kayu Selatan	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-
54	Kecamatan Pasar Rebo	Kelurahan Kalisari	Jalan H. Enjong, RT 008 RW 01, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo	206	1975	Rusak Ringan	-
55	Kecamatan Pasar Rebo	Kelurahan Pekayon	Jalan Lapan I, RT 009 RW 01, Kelurahan Pekayon	352	1999	Rusak Sedang	-
56	Kecamatan Pasar Rebo	Kelurahan Cijantung	Jalan Stadion Mini, RT 008 RW 02, Kelurahan Cijantung	300	1975	Rusak Berat	-
57	Kecamatan Pasar Rebo	Kelurahan Baru	Jalan Serbaguna, RT 002 RW 01	200	1976	Rusak Ringan	-
58	Kecamatan Pasar Rebo	Kelurahan Gedong	Jalan Kesehatan, RT 04 RW 011, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo	150	1970	Rusak Berat	-
59	Kecamatan Pulogadung	Kelurahan Rawamangun	Jalan Balai Pustaka Baru	301	1987	Rusak Berat	-

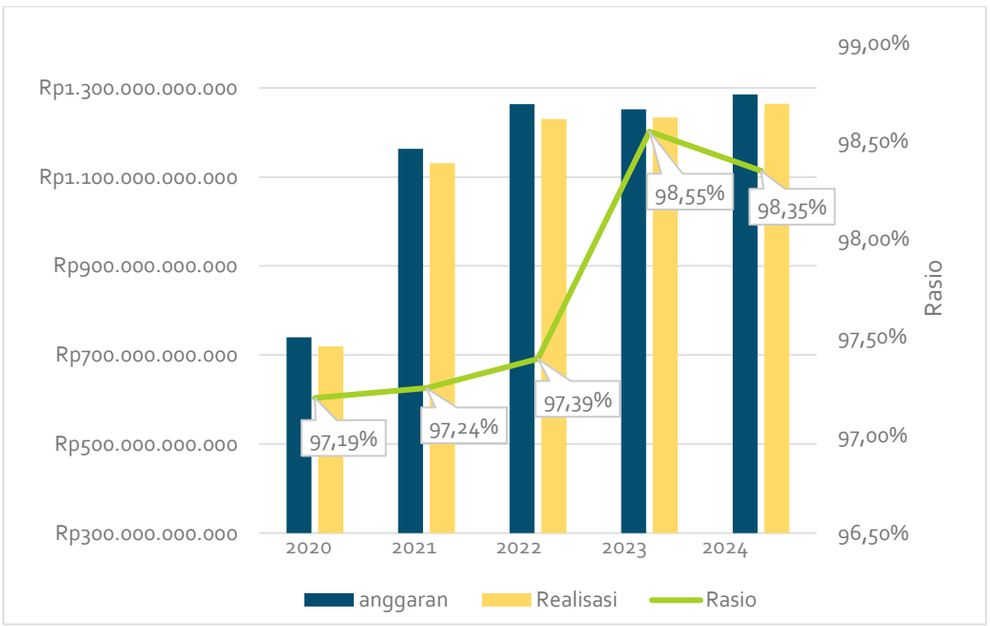
No.	Kecamatan	Kelurahan	Alamat Rumah Dinas	Luas Tanah Rumah Dinas (m²)	Tahun Rumah Dinas Dibangun	Kondisi Rumah Dinas Lurah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
60	Kecamatan Pulogadung	Kelurahan Pulogadung	Jalan Balai Pustaka Baru, RT 7 RW 07, Kelurahan Rawamangun	346	1999	Rusak Berat	-
61	Kecamatan Pulogadung	Kelurahan Jati	Jalan Balai Pustaka Baru Nomor 20, Kelurahan Rawamangun	215	1985	Rusak Berat	-
62	Kecamatan Pulogadung	Kelurahan Jatinegara Kaum	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-
63	Kecamatan Pulogadung	Kelurahan Kayu Putih	Jalan Balai Pustaka Baru I, RT 07 RW 07, Kelurahan Rawamangun	220	1987	Rusak Sedang	-
64	Kecamatan Pulogadung	Kelurahan Pisangan Timur	Jalan Balai Pustaka Baru, Kelurahan Rawamangun	195	1987	Rusak Sedang	-
65	Kecamatan Pulogadung	Kelurahan Cipinang	-	-	-	Tidak Memiliki Rumah Dinas	-

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

II.1.4. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur dapat di lihat dari capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran. Capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur periode Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel II.14 dan Tabel II.15 di bawah ini. Tabel II.14. menunjukkan capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020–2022 sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018–2022, sedangkan Tabel II.15 menunjukkan capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023–2024 sesuai dengan Renstra Tahun 2023–2026. Secara umum seluruh target kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur pada 5 (lima) tahun ke belakang yaitu periode 2020–2024 telah tercapai dengan baik.

Realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur selama periode Tahun 2022 hingga 2024 memberikan gambaran penting terhadap kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur. Tingginya tingkat realisasi anggaran, yang berada di atas 97 persen setiap tahunnya, merupakan indikator bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah berjalan secara optimal dan relatif efisien dapat dilihat pada Gambar II.11. Capaian ini mencerminkan kemampuan Perangkat Daerah dalam menyerap anggaran sesuai perencanaan serta mendistribusikan sumber daya secara efektif.



Gambar II.11 Grafik Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020–2024
Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Tabel II.15 Realisasi Target Capaian Program Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020–2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN RENSTRA			REALISASI KINERJA SASARAN RENSTRA		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Tersedianya Pelayanan Perkantoran Kota Administrasi Jakarta Timur yang Berkualitas untuk Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
			Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	100%	100%	95%	99,57%	100%	100%
		Mewujudkan Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Kota Administrasi Jakarta Timur	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	100%	90%	95%	98,99%	100%	100%
			Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur >80%	100%	100%	95%	100%	100%	100%
			Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN RENSTRA			REALISASI KINERJA SASARAN RENSTRA		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
			Penyelesaian Sengketa Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	86%	100%	100%	81,55%
			Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan LKIP)	100%	100%	92%	100%	100%	100%
			Persentase Jumlah Wirausaha Baru yang Tercapai	100%	100%	100%	100%	107,23%	106,5%
			Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Koordinasi Pelaksanaan BOP dan BOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
			Jumlah Kawasan yang Tertata	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN RENSTRA			REALISASI KINERJA SASARAN RENSTRA		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
		Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Perlengkapannya Sesuai Standar yang Mendukung Pelayanan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur	3 Indeks	4 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
			Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang Memenuhi Standar	69 Gedung	1 Gedung	3 Gedung	66 Gedung	1 Gedung	3 Gedung

Sumber : LKIP Kota Administrasi Jakarta Timur, 2023

Tabel II.16 Realisasi Target Capaian Program Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 dan 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN		REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN	
					2023	2024	2023	2024
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	86,75	87,3	93,22	96,66
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	88,50	88,6	95,05	97,91
			Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	85	86	91,39	95,42

Sumber: LKIP Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Realisasi capaian target Program Kota Administrasi Jakarta Timur periode Tahun 2020–2024 pada Tabel II.14 dan Tabel II.15 bersumber dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada Tahun 2023, terjadi penambahan indikator akibat perubahan nomenklatur kegiatan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Perubahan ini memengaruhi fokus dan tujuan kegiatan, sehingga berdampak pada relevansi indikator kinerja. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian indikator secara berkala menjadi penting untuk menjaga akurasi pengukuran capaian. Untuk selanjutnya, perumusan indikator pelayanan akan terus ditingkatkan agar mampu mencerminkan tugas dan fungsi pelayanan secara lebih tepat.

Penilaian kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Pengukuran kinerja pelayanan di Kota Administrasi Jakarta Timur dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun di seluruh Kelurahan. Survei ini menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel II.16. Data menunjukkan nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Timur mengalami peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan.

Tabel II.17 Hasil Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020–2024

No	Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (*persen*)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Matraman	83,57	91,22	93,67	94,4	98,17
2	Pulogadung	86,75	90,76	93,23	93,9	98,43
3	Jatinegara	86,44	92,13	93,05	94,11	97,10
4	Kramat Jati	85,71	94,78	91,62	93,71	96,24
5	Pasar Rebo	85,94	91,80	93,74	96,53	98,22
6	Cakung	84,82	96,39	95,55	97,46	98,72
7	Duren Sawit	85,44	92,94	93,71	93,87	98,51
8	Ciracas	83,12	88,31	94,47	95,45	98,12
9	Makasar	84,61	93,44	93,44	95,45	96,88
10	Cipayung	84,79	94,20	95,85	95,76	98,68
Rata-Rata		85,21	92,59	93,83	95,06	97,90

Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Capaian Indikator Makro Jakarta Timur memberikan gambaran menyeluruh atas perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus mencerminkan kinerja pelayanan Pemerintah Daerah. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan, IPM, dan kualitas lingkungan hidup menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan pembangunan. Melalui capaian periode 2020–2024, dapat diidentifikasi keberhasilan dan tantangan pelayanan publik dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Data selengkapnya disajikan pada Tabel II.19 berikut.

Tabel II.18 Capaian Indikator Makro Jakarta Timur

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia	82,84	83,14	83,60	84,26	84,76
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-4,48	4,77	5,02	5,15	4,49
Kontribusi PDRB (%)	16,87	17,18	17,03	17,07	17,00
Total PDRB (Triliun Rupiah)	469,99	500,41	547,05	592,38	630,60
PDRB per Kapita (ADHB, ribu rupiah)	155.207	163.971	178.431	192.357	204.344
Prevalensi *stunting*	N/A	13,4	14,4	16,8	16,4
Tingkat Kemiskinan (%)	4,16	4,28	4,30	4,20	4,09
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,29	8,23	8,39	7,24	6,95
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	43,09	46,58	46,24	51,11

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta, 2025

Pada Tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan guncangan besar terhadap kondisi makro Provinsi DKI Jakarta, termasuk Wilayah Jakarta Timur. Hal ini terlihat dari kontraksi ekonomi yang cukup dalam sebesar -4,48 persen serta melonjaknya Tingkat Pengangguran Terbuka hingga 9,29 persen. Dampak sosial ekonomi dari pandemi juga tercermin pada peningkatan kerentanan masyarakat, meskipun angka kemiskinan relatif terkendali di level 4,16 persen. Pada periode ini, kualitas lingkungan hidup juga masih rendah dengan nilai indeks 43,09.

Memasuki Tahun 2021 hingga Tahun 2024, indikator makro menunjukkan arah pemulihan. Pertumbuhan ekonomi kembali positif dan stabil di atas 4 persen, bahkan mencapai puncaknya 5,15 persen pada Tahun 2023. Perbaikan ini sejalan dengan meningkatnya total PDRB dari Rp 469,99 triliun pada Tahun 2020 menjadi Rp630,60 triliun pada Tahun 2024, dengan kontribusi tetap sekitar 17 persen terhadap perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Pada saat yang sama, Tingkat

Pengangguran berhasil ditekan hingga 6,95 persen pada Tahun 2024, disertai penurunan angka kemiskinan menjadi 4,09 persen.

Selain aspek ekonomi, pembangunan manusia juga menunjukkan kecenderungan positif dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 82,84 pada Tahun 2020 menjadi 84,76 pada Tahun 2024. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup turut membaik secara signifikan, mencapai 51,11 pada Tahun 2024. Perkembangan ini menggambarkan bahwa meskipun pandemi sempat menekan berbagai aspek kehidupan, Jakarta Timur mampu melakukan pemulihan yang cukup kuat di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

II.1.5. Kelompok sasaran layanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan kelompok sasaran layanan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah. Kelompok sasaran ini mencakup berbagai lapisan sosial dengan tujuan memastikan akses yang merata terhadap layanan kota yaitu:

1. Masyarakat umum;
2. Kelompok Rentan dan Berkebutuhan Khusus yaitu lansia, difabel, dan penduduk miskin;
3. Pelaku usaha dan ekonomi, yaitu UMKM, Wirausaha, Industri perdagangan, koperasi dan usaha sosial; dan
4. Pelajar dan Pendidik.

Penetapan kelompok sasaran layanan bertujuan untuk memastikan keadilan sosial, kesejahteraan warga, serta pembangunan kota yang inklusif. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan ini, Jakarta Timur diharapkan menjadi kota yang lebih nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada subbab ini akan disampaikan penjabaran mengenai rumusan permasalahan yang merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Selain itu terdapat perumusan isu strategis pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur periode Tahun 2025–2029 yang disusun berdasarkan hasil sintesis permasalahan dan capaian pembangunan periode sebelumnya (2020–2024) dengan penyelarasan isu dan kebijakan sekala Global, Nasional, dan Regional.

II.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kota Administrasi Jakarta Timur menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam kerangka Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah. Di sisi lain, Kota Administrasi Jakarta Timur juga berperan untuk mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut faktanya berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya.

Jakarta Timur menghadapi beberapa tantangan antara lain urbanisasi, infrastruktur, lingkungan, dan sosial-ekonomi. Jakarta Timur berfungsi sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota penyangga seperti Bekasi dan Depok, sehingga arus kendaraan yang melintasi wilayah ini sangat tinggi. Kemacetan masih sering terjadi di jalan-jalan utama seperti Jalan Raya Bogor, Jalan Kalimalang, Jalan DI Panjaitan, dan Tol Jagorawi. Jakarta Timur memiliki beberapa hub transportasi regional utama seperti Stasiun Jatinegara, Terminal Kampung Melayu, dan Terminal Pulogebang, yang menghubungkan berbagai rute penting. Wilayah ini juga didukung oleh moda transportasi seperti KRL *Commuter Line*, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, dan TransJakarta. Namun demikian, meskipun terdapat sejumlah pilihan moda transportasi seperti KRL *Commuter Line*, LRT Jabodebek, dan TransJakarta, integrasi antar moda masih belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan bepergian masyarakat, sehingga banyak warga tetap bergantung pada kendaraan pribadi.

Kota Jakarta Timur dengan luasan sebesar 18.988,02 hektare, sekitar 46% atau 8.781,78 hektare digunakan sebagai kawasan permukiman. Berdasarkan data Tahun 2023 menunjukkan bahwa Jakarta Timur memiliki jumlah rumah tangga terbanyak di Provinsi DKI Jakarta, yakni 797.572 rumah tangga, yang mencerminkan tingginya daya tarik Kota Jakarta Timur sebagai lokasi hunian.

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak, Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman, pengelolaan persampahan, sistem sanitasi, serta pelestarian dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Keberadaan RTH tidak hanya penting untuk menjaga kualitas lingkungan,

tetapi juga berfungsi sebagai ruang rekreasi dan wisata bagi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kawasan permukiman di Jakarta Timur yang belum mendapatkan layanan dasar secara optimal, seperti sanitasi, air minum, fasilitas umum, dan akses terhadap hunian layak.

Laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi turut mendorong meningkatnya kebutuhan akan perumahan. Namun, akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang terjangkau masih menjadi tantangan utama. Selain itu, wilayah bantaran sungai seperti Cawang, Kampung Melayu, Cipinang Melayu, dan Bidara Cina memiliki risiko banjir yang tinggi. Oleh karena itu, perhatian terhadap pengembangan sistem drainase, penambahan area resapan air, dan penataan kawasan sungai perlu ditingkatkan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Isu kemiskinan di Jakarta Timur menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada Tahun 2020, persentase tingkat kemiskinan tercatat sebesar 4,16%, meningkat menjadi 4,30% pada Tahun 2022, lalu menurun kembali menjadi 4,09% pada Tahun 2024. Meskipun terdapat penurunan, angka tersebut masih memerlukan perhatian serius melalui intervensi yang tepat untuk memastikan pengentasan kemiskinan berjalan secara berkelanjutan. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta Timur menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak Tahun 2020, dari 9,29% menjadi 6,95% pada Tahun 2024. Tren positif ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui kolaborasi antara Pemerintah, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan agar lebih banyak masyarakat dapat terserap ke dalam lapangan kerja yang tersedia.

Dalam aspek pelestarian budaya, Jakarta Timur, sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di Provinsi DKI Jakarta, dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa, diantaranya Betawi, Sunda, Jawa, Bali, Melayu, Maluku, serta etnis lainnya, termasuk Tionghoa, Arab, Portugis, Belanda, dan India. Suku Betawi, sebagai penduduk asli Jakarta, lahir dari perpaduan berbagai budaya yang membentuk identitas khasnya. Budaya Betawi sendiri banyak menyerap unsur-unsur dari budaya Arab, Tiongkok, India, dan Portugis, menjadikannya sebagai budaya mestizo, hasil akulturasi dari berbagai etnis.

Sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya ini, Jakarta Timur memiliki 9 cagar budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian serta 18 museum, yang sebagian besar berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). TMII berfungsi sebagai pusat kebudayaan, yang tidak hanya memperkenalkan budaya Betawi melalui Anjungan Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga menampilkan berbagai seni musik, tari, teater, serta tradisi khas Betawi

lainnya. Namun, meskipun potensi narasi sejarah dan keberadaan cagar budaya di Jakarta Timur sangat besar, pemanfaatannya masih belum optimal. Potensi tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam mendukung upaya pendidikan budaya dan pengembangan sektor wisata sejarah. Selain itu, eksposur terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya lokal di kalangan masyarakat juga masih terbatas. Akibatnya, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian budaya dan warisan sejarah masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan potensi tersebut dan diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap pelestarian budaya yang pada akhirnya dapat memperkuat identitas budaya kota Jakarta Timur.

II.2.2. Isu Lingkungan Dinamis

Isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur dirumuskan melalui analisis terhadap kesenjangan capaian pembangunan serta keterkaitan isu dan kebijakan pada tingkat Global, Nasional, dan Regional yang mempengaruhi arah pembangunan wilayah di masa mendatang. Proses ini menghasilkan identifikasi isu-isu pembangunan yang bersifat multidimensional dan saling berkaitan, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan terpadu lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan intervensi yang terfokus pada isu-isu prioritas yang paling strategis guna menciptakan dampak signifikan dalam penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan.

A. Identifikasi Isu Skala Global

Triple Planetary Crisis atau Tiga Krisis Planet kini tengah melanda bumi. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati serta penumpukan berbagai limbah dan polusi menjadi permasalahan lingkungan yang saling berkaitan dalam *Triple Planetary Crisis*. Isu lingkungan global ini menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan semua makhluk hidup dan ekosistem.

Jakarta, sebagai bagian dari konstelasi Kota Global, tidak luput dari ancaman krisis lingkungan. Kota Administrasi Jakarta Timur, yang merupakan salah satu wilayah di Provinsi DKI Jakarta serta dikenal sebagai kawasan industri dan permukiman padat, turut berkontribusi terhadap berbagai isu lingkungan tersebut. Beragam tantangan seperti peningkatan fenomena urban *heat island*, banjir, penurunan muka tanah (*land subsidence*), polusi lintas daerah (*transboundary pollution*), pencemaran sungai, kemacetan, serta penurunan keanekaragaman hayati menjadi isu lingkungan yang nyata di wilayah Jakarta Timur. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim

(RAN-API), dan berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pencapaian target perubahan iklim. Komitmen ini diwujudkan melalui implementasi Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD), sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim menuju target *Net Zero Emission* pada tahun 2050.

Disrupsi teknologi dan kemajuan komputasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) yang sangat cepat, inovasi teknologi digital berkembang secara pesat beberapa tahun terakhir dan diprediksi akan terus berkembang dan mendorong transformasi industri. Mulai dari otomasi pemrosesan data masif (*big data)*, pembelajaran mesin (*mechine learning*), hingga adopsi AI dalam pekerjaan akan mempengaruhi dalam layanan publik dan sektor industri. Fenomena ini akan menciptakan peluang besar dalam peningkatan efisiensi, produktivitas, dan perluasan informasi. Tidak hanya itu, fenomena kemajuan teknologi ini juga akan menimbulkan tantangan struktural yang signifikan, khususnya terhadap transformasi tenaga kerja, ketimpangan akses terhadap teknologi, dan keamanan serta etika digital yang dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia termasuk Jakarta, perlu menempatkan isu ini sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan, dengan memastikan ekosistem inovasi dan digitalisasi dikembangkan secara merata, adaptif, dan berkelanjutan, agar tidak tertinggal dalam kompetisi global serta mampu melindungi kepentingan publik di era disrupsi teknologi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TPB memuat 17 tujuan utama dan 169 target yang secara komprehensif mencakup tiga dimensi utama pembangunan berkelanjutan yaitu, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Agenda ini dirancang untuk menjadi pedoman global dalam mengakhiri kemiskinan ekstrem, memerangi ketimpangan, dan mengatasi perubahan iklim, sekaligus menjamin bahwa tidak ada satu pihak pun yang tertinggal (*leave no one behind*). Dalam konteks ini, peran Pemerintah Daerah sangat strategis karena sebagian besar target TPB hanya dapat tercapai melalui kebijakan, program, dan pelayanan publik di tingkat lokal untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang inklusif. Berdasarkan identifikasi, Jakarta sebagai pusat aktivitas sosial-ekonomi nasional menghadapi beberapa tantangan dalam implementasi TPB.



Gambar II.12 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: https://localisesdgs-indonesia.org/

Sebagai bagian dari Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur menghadapi tantangan urbanisasi yang sangat cepat, tingginya ketimpangan pendapatan dan kualitas hidup, tekanan terhadap kualitas lingkungan, serta kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Hal ini menjadikan integrasi TPB bukan sekadar komitmen normatif, melainkan kebutuhan strategis dalam mewujudkan pembangunan kota yang berketahanan, setara, dan berdaya saing global. Oleh karena itu, seluruh program dan kebijakan strategis di Jakarta perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target TPB, seperti pengurangan kemiskinan (Tujuan 1), mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif (Tujuan 8), industri, inovasi dan infrastruktur (Tujuan 9), berkurangnya kesenjangan (Tujuan 10), kota dan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan (Tujuan 11), serta aksi terhadap perubahan iklim (Tujuan 13).

B. Identifikasi Isu Skala Nasional

Kepentingan Nasional merupakan aspek yang harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk bagi Kota Administrasi Jakarta Timur. Di samping itu, isu dan permasalahan strategis berskala Nasional memiliki potensi keterkaitan dan pengaruh terhadap isu dan permasalahan strategis di tingkat daerah. Oleh karena itu, integrasi yang optimal antara rencana pembangunan nasional dan daerah yang mencakup keselarasan dalam kepentingan, tujuan, permasalahan, dan isu strategis akan memperkuat sinergi kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, identifikasi isu-isu strategis Nasional menjadi langkah penting agar selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk di tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Adapun isu strategis Nasional tersebut telah dirumuskan dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas amanat perencanaan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan Arah Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMN 2025–2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dokumen RPJMN Tahun 2025–2029 mengarahkan untuk memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045 dengan Misi yang dituangkan pada 8 (delapan) Asta Cita yang memuat 17 Program Prioritas Nasional untuk memenuhi Agenda Pembangunan Jangka Menengah. Dalam mencapai Visi tersebut, terdapat 4 (empat) Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah yang mencakup:

1. Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju;
2. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menjuju *net zero emission.*



Gambar II.13 Strategi Pengembangan Wilayah RPJMN 2025–2029
Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2025

Lima sasaran pembangunan tersebut menjadi acuan strategis bagi Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan arah pembangunan Nasional. Secara umum, RPJMN 2025–2029 memberikan intervensi yang ditujukan untuk penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

yang merata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di wilayah Jakarta Timur tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Nasional secara holistik.

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara kebijakan Nasional dan perencanaan pembangunan Daerah, identifikasi isu strategis Kota Administrasi Jakarta Timur mengacu pada prioritas pembangunan utama sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, Strategi Prioritas Pembangunan berfokus pada menurunkan tingkat kemiskinan, strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, strategi mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan, dan strategi mencapai pemerataan pembangunan. Terdapat langkah konkret berupa Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025–2029 yang menetapkan Proyek Strategis Nasional yang berkaitan dengan Jakarta yang menjadi pedoman dalam prioritas pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur. Secara teknis, RPJMN 2025–2029 menetapkan Proyek Strategis Nasional yang mendukung secara signifikan terhadap pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama. Terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional yang berkaitan langsung dengan wilayah Jakarta antara lain adalah proyek pembangunan jaringan gas perkotaan, Pengembangan Jakarta *Metropolitan Mass Rapid Transit* Koridor Timur-Barat, Program Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, dan *Jakarta Sewerage System*. Proyek-proyek tersebut menjadi pedoman yang perlu diprioritaskan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

C. Identifikasi Isu Skala Regional

Dalam mengidentifikasi isu perlu memperhatikan dinamika dan kepentingan pembangunan pada tingkat Regional, khususnya dalam konteks Provinsi DKI Jakarta sebagai satu kesatuan wilayah metropolitan yang saling terhubung secara fungsional. Kepentingan Regional mencerminkan kebutuhan kolektif lintas wilayah administratif, termasuk keterkaitan dalam hal transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, ketahanan bencana, hingga pelayanan dasar antarwilayah di Provinsi DKI Jakarta.

Isu-isu strategis yang bersifat regional sering kali tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu wilayah saja, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif antar kota dan antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mengidentifikasi dan menyelaraskan prioritas pembangunan daerahnya dengan Arah Kebijakan yang termuat dalam dokumen RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2045 dan RPJMD Provinsi

DKI Jakarta Tahun 2025–2029. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan responsif terhadap kepentingan regional, diharapkan strategi pembangunan Wilayah Jakarta Timur mampu memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan, serta memperkuat peran Jakarta sebagai Kota Global yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Sebagai bagian dari wilayah Jakarta, Kebijakan pengembangan wilayah Jakarta Timur tertuang dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan dokumen RTRW, dalam mencapai kondisi pembangunan kota yang berorientasi pada transportasi publik, digital dan pemenuhan infrastruktur dasar dapat diwujudkan dengan pengembangan pusat pelayanan dan pengembangan kawasan strategis.

Sistem Pusat Pelayanan dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta dirancang berdasarkan ketersediaan jaringan transportasi, dengan tujuan mengembangkan kawasan berorientasi transit yang memusatkan kegiatan hunian berintensitas tinggi. Penetapan kawasan pelayanan mempertimbangkan jarak layanan angkutan, serta jumlah dan jenis moda transportasi, sehingga terbentuk hierarki pusat pelayanan berupa Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Berikut adalah sistem pusat pelayanan yang direncanakan untuk wilayah Jakarta Timur :

Tabel II.19 Sistem Pusat Pelayanan Jakarta Timur

No.	Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi Sistem Pusat Pelayanan
1.	PPK	• Sentra Primer Timur di Kecamatan Cakung • Cakung di Kecamatan Cakung • Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas • Kawasan Cawang di Kecamatan Jatinegara
2.	SPPK	• Pulogadung di Kecamatan Cakung • Pulomas di Kecamatan Pulogadung • Halim di Kecamatan Makasar
3.	PPL	• Pramuka di Kecamatan Matraman • Jatinegara di Kecamatan Jatinegara • Cipinang di Kecamatan Jatinegara • Velodrome Rawamangun di Kecamatan Pulo Gebang

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024–2044

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting dalam lingkup Provinsi terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan berdasarkan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Pada Kota Administrasi Jakarta timur terdapat 2 (dua) wilayah yang dijadikan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, sebagai berikut:

Tabel II.20 Tujuan dan Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Jakarta Timur dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan Jakarta Industrial-Estate Pulogadung	
Tujuan	Sebagai kawasan industri terpadu yang mengintegrasikan bisnis kreativitas dan komunitas
Arahan	• Peningkatan aksesibilitas melalui integrasi dengan transportasi publik; • Penyediaan ruang hijau dan badan air skala kawasan sebagai tempat rekreasi dan usaha penanggulangan banjir; • Penyediaan perumahan yang terjangkau, aman, dan nyaman; • Penyediaan jalur pejalan kaki untuk meningkatkan konektivitas pejalan kaki; dan • Pengembangan kawasan dengan fungsi industri dan komersial yang dapat mengakomodir tenaga kerja baru.
Kawasan Pusat Industri Kecil Pulogadung	
Tujuan	Sebagai sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Arahan	• Peningkatan konektivitas dan permeabilitas kawasan, melalui peningkatan opsi aksesibilitas dengan tujuan memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh pejalan kaki, melalui penyediaan jalur pejalan kaki; • Penataan kawasan menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanaman modal dalam negeri dan asing, didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai; • Peningkatan aksesibilitas kawasan dengan pengintegrasian titik transit dengan kawasan UMKM dan permukiman sekitarnya; dan • Pengembangan ruang bisnis kreatif sebagai wadah inovasi untuk meningkatkan daya saing kawasan serta mendukung keberlanjutan usaha UMKM.

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024–2044

Sedangkan dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya, Wilayah Jakarta Timur memiliki satu kawasan yang penting dalam lingkup wilayah provinsi pada bidang sosial budaya adalah Kawasan Jatinegara, dengan tujuan sebagai pusat kebudayaan Betawi dan pelestarian bangunan bersejarah meliputi Taman Benyamin Sueb dan Stasiun Jatinegara. Arahan pengembangannya meliputi,

pengembangan kegiatan pariwisata berbasis pelestarian budaya Betawi, pelestarian objek cagar budaya berupa Gedung Eks Kodim 0505 dan Stasiun Jatinegara dan pengembangan kawasan terpadu dengan mengoptimalkan fungsi Pasar Jatinegara sebagai kawasan perdagangan untuk mendukung kegiatan pariwisata.

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor pengembangan wilayah Jakarta Timur tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan daerah sekitarnya agar pengembangan dapat berjalan dengan baik dan tidak saling tumpeng tindih satu sama lain.

Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta

Isu strategis dalam RPJPD DKI Jakarta Tahun 2025–2024 dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada di Jakarta serta isu strategis tingkat global, nasional, dan regional. Isu strategis jangka panjang pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berdaya saing global;
2. Pemerataan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan produktivitas ekonomi yang setara dengan kota global di negara maju dan stabilitas ekonomi yang kokoh;
4. Peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan budaya di kancah global;
5. Optimalisasi riset dalam mendukung penciptaan inovasi dan pengembangan;
6. Optimalisasi pergerakan manusia, barang, dan informasi;
7. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik yang efisien dan efektif;
8. Perwujudan kota layak huni yang aman, nyaman, dan berkelanjutan; dan
9. Penciptaan lingkungan perkotaan yang mandiri adaptif dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Visi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2045, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, adalah “Jakarta Kota Global yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.” Visi ini dirancang untuk mencapai 5 (lima) sasaran utama, termasuk meningkatkan Indeks Modal Manusia, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan (Rasio Gini), meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, memperbaiki peringkat Kota Global dalam Indeks Ekonomi, serta mengurangi emisi Gas Rumah Kaca secara signifikan.

Dalam mewujudkan Visi dan Sasaran, dirumuskan 8 (delapan) Misi Jangka Panjang Daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera;
2. Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas;
4. Mewujudkan Stabilitas Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global;
5. Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis;
6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah Jakarta yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Infrastruktur Jakarta yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Pembangunan Jakarta yang Sinergis dan Berkesinambungan.

Kemajuan Jakarta diarahkan untuk mewujudkan kota yang modern, inovatif, adaptif, responsif, dan progresif terhadap dinamika global. Ciri utama dari transformasi ini meliputi pemanfaatan pengetahuan dan inovasi dalam pembangunan wilayah, penyediaan infrastruktur modern yang berkualitas dan tangguh, layanan publik dan jasa yang unggul, serta regulasi dan tata kelola yang transparan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat urban. Jakarta yang maju ditopang oleh masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berbudaya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai luhur bangsa.

Sebagai kota yang berdaya saing, Jakarta diorientasikan untuk menjadi pusat pertumbuhan yang kompetitif secara global, mampu menarik arus modal, talenta, barang, informasi, dan teknologi. Karakteristik kota berdaya saing ditunjukkan oleh sumber daya manusia yang unggul, sistem ekonomi yang tangguh dan produktif, infrastruktur yang andal, interaksi budaya yang terbuka dan dinamis, serta peran aktif dalam diplomasi kota-kota dunia. Di sisi lain, keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pembangunan, dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jakarta yang berkelanjutan ditandai dengan kualitas lingkungan yang lestari, ketahanan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, serta kemampuan adaptif dalam menjaga ketahanan air, energi, dan pangan melalui sistem pembangunan yang tangguh dan selaras dengan ekosistem.

Berdasarkan Dokumen RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2024, telah ditetapkan arah pengembangan kewilayahan yang dirumuskan berdasarkan 2 (dua) aspek potensi pengembangan ruang dan potensi peningkatan ekonomi dalam mendukung pencapaian Visi Jakarta 2045. Arahan pengembangan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dijelaskan adanya pengembangan aktivitas pergudangan dan logistik, peningkatan produktivitas industri 4.0 dan UMKM, peningkatan integrasi dan konektivitas transportasi publik, dan pengoptimalan penyediaan dan distribusi ketahanan dan pangan daerah.

Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta

RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 yang merupakan penjabaran Visi Misi Gubernur DKI Jakarta menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur. Isu-isu pembangunan Jakarta pada dokumen RPJMD disusun berdasarkan identifikasi gap kinerja pembangunan serta isu dan kebijakan skala global, nasional, dan regional yang relevan dengan pembangunan Jakarta. Teridentifikasi 7 (tujuh) indikator strategis pembangunan, yaitu:

1. Modal Manusia Tinggi dan Masyarakat Madani

Sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam membangun Jakarta menuju Kota Global yang maju dan berdaya saing. Kualitas manusia Jakarta, yang tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diharapkan tidak hanya berada di atas rata-rata Nasional, tetapi juga mampu sejajar dengan kota-kota global lainnya. Peningkatan IPM secara langsung akan memperkuat daya saing daerah, yang pada akhirnya memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan kota secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan memperluas akses bagi seluruh warga, dari berbagai kelompok usia dan jenjang. Upaya ini diperkuat dengan program pelatihan dan sertifikasi bagi pendidik serta tenaga kependidikan agar mereka semakin cakap dan terampil dalam menjalankan tugasnya secara efektif.

Selain sektor pendidikan, penciptaan ekosistem inovasi yang berdaya saing juga menjadi strategi penting. Ekosistem ini diharapkan mampu menarik talenta unggul sekaligus investasi pada sektor-sektor berproduktivitas tinggi, sehingga memberikan efek berantai berupa *knowledge spillover* yang bermanfaat tidak hanya bagi Jakarta, tetapi juga bagi Indonesia. Dalam era globalisasi dan revolusi teknologi informasi yang begitu cepat, inovasi menjadi kebutuhan mutlak. Seluruh *stakeholder* yang terlibat mulai dari lembaga penelitian pemerintah, universitas, pusat riset industri, hingga peneliti independen menjadi faktor penentu.

Riset yang kuat akan melahirkan inovasi yang relevan dan bernilai tambah, mendukung perkembangan bisnis, serta meningkatkan daya saing wilayah di tengah persaingan global. Untuk itu, penguatan ekosistem riset menjadi sangat penting, yang mencakup perbaikan kualitas sumber daya riset, kelembagaan, pendanaan, regulasi, hingga akuntabilitas. Meski demikian, Jakarta masih menghadapi tantangan besar dalam aspek-aspek tersebut, sehingga investasi dan pengembangan berkelanjutan di sektor riset dan inovasi menjadi kebutuhan strategis demi memastikan keberlanjutan daya saing kota.

2. Pemerataan dan Kebermanfaatan Hasil Pembangunan

Ketimpangan pembangunan masih menjadi salah satu isu kewilayahan yang dihadapi Jakarta, yang salah satunya tercermin melalui indikator tingkat kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan memiliki arti strategis karena secara langsung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan pada akhirnya mendorong kemajuan ekonomi serta daya saing kota. Hal ini dapat dilakukan dengan cara :

- Upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan dilakukan melalui penguatan koordinasi di tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi, dengan menempatkan peran Walikota dan Bupati sebagai koordinator utama. Langkah ini penting untuk memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Pemerataan akses terhadap layanan dasar menjadi fokus utama dalam menciptakan keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup. Meski terdapat kemajuan, kesenjangan antarwilayah dan kelompok masyarakat, khususnya pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan, masih terlihat nyata. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang berkelanjutan, serta kesempatan kerja yang inklusif. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan pelatihan vokasional, pengembangan kewirausahaan, serta pemanfaatan transformasi ekonomi digital agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Pemerintah terus berupaya terus memperkuat layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Upaya ini ditempuh melalui peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial yang dimutakhirkan secara berkala sehingga lebih akurat dan komprehensif. Di samping itu, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi pelayanan sosial menjadi perhatian penting, termasuk

pengembangan kolaborasi dengan pihak non-pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyempurnaan kebijakan perlindungan sosial juga terus dilakukan agar program yang dijalankan semakin efektif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

3. Perekonomian Produktif, Kompetitif dan Atraktif di Pasar Global

Jakarta yang mengemban peran sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global dituntut untuk tetap mempertahankan ritme dan produktivitas ekonominya, yang ditunjukkan oleh indikator PDRB Jakarta. Dengan meningkatkan PDRB Jakarta, kualitas hidup masyarakat Jakarta dan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sehingga belanja infrastruktur maupun pendidikan dan kesehatan di Jakarta juga dapat meningkat. Namun demikian, peningkatan emisi akibat tingginya aktivitas ekonomi merupakan eksternalitas yang perlu diantisipasi, dengan demikian upaya peningkatan produktivitas ekonomi perlu dilakukan secara selektif dan berkelanjutan.

Jakarta sebagai *Economic Node* Asia Tenggara mendapatkan dukungan signifikan dari keberadaan Sekretariat *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang berlokasi di kota ini. Sebagai pusat administrasi dan diplomasi regional, Sekretariat ASEAN memainkan peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan ekonomi dan perdagangan antarnegara di kawasan. Hal ini memberikan Jakarta posisi yang strategis sebagai simpul utama untuk interaksi ekonomi, baik secara regional maupun global. Keberadaan Sekretariat ASEAN memperkuat citra Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan diplomasi internasional. Kota Jakarta menjadi tuan rumah bagi berbagai pertemuan strategis yang melibatkan pemangku kepentingan dari negara-negara ASEAN, serta mitra dagang global. Dalam konteks ini, Jakarta memiliki peluang besar untuk menarik investasi, baik dari dalam kawasan maupun dari negara-negara di luar ASEAN. Potensi ini memberikan peluang besar bagi Jakarta untuk menjadi kekuatan ekonomi yang produktif, kompetitif, dan atraktif di pasar global.

4. Pemerintahan Dinamis dengan Performa Layanan Prima.

Kemajuan kota, keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta tidak terlepas dari peran Pemerintah sebagai regulator dan katalisator unsur-unsur pembangunan kota. Penerapan *good governance* melalui penyederhanaan birokrasi akan meningkatkan *ease of doing business* sehingga dapat menarik investasi ke dalam Jakarta yang selanjutnya akan menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan daya saing kota secara keseluruhan. Hal

ini dapat dilakukan, di antaranya melalui tata kelola yang baik (*good governance*) yang dapat diwujudkan melalui Reformasi Birokrasi dengan memaksimalkan kinerja, meningkatkan mutu pelayanan, dan memperkuat kompetensi serta akuntabilitas pemerintahan. Selanjutnya dengan optimalisasi manajemen tata talenta sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kompetensi, kinerja dan profesionalisme tinggi.

5. Infrastruktur Kota yang Layak dan Berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas mencakup pemenuhan akses air bersih, sanitasi yang layak, pengelolaan sampah yang efektif, serta penyediaan permukiman yang layak huni. Namun, tata kelola layanan dasar tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di Jakarta.

Sebagian besar rumah tangga masih bergantung pada air tanah yang penggunaannya secara berlebihan menimbulkan dampak serius, seperti penurunan muka tanah, intrusi air laut, serta meningkatnya risiko banjir. Sementara itu, cakupan sanitasi dan drainase yang layak masih belum merata. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi perlu dilakukan melalui sistem pengolahan limbah terpusat.

Pengelolaan sampah juga menjadi tantangan serius, terutama karena meningkatnya volume sampah dan keterbatasan lahan. Strategi pengelolaan berbasis data, pemanfaatan teknologi yang tepat, dan pembangunan fasilitas pengolahan menjadi langkah penting untuk mengurangi beban sampah. Selain itu, penerapan konsep ekonomi sirkuler melalui kegiatan daur ulang (*recycle*) dan peningkatan nilai guna (*upcycle*) diharapkan dapat memperluas peluang usaha, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat peran UMKM dalam pengelolaan limbah.

Disisi lain, kebutuhan hunian layak pun semakin mendesak seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya daya tarik Jakarta sebagai kota global. Untuk mengatasi keterbatasan lahan, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 dan Nomor 20 Tahun 2024, pembangunan rumah flat dengan kepadatan tinggi hingga empat lantai diperbolehkan sebagai alternatif hunian. Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan perumahan yang layak, efisien, dan berkelanjutan.

6. Ekosistem Yang Seimbang dan Berketahanan Iklim.

Lingkungan hidup sebagai ruang utama seluruh aktivitas masyarakat Jakarta kini menghadapi krisis ekologis yang bersifat global dan lokal. Daya dukung dan daya tampung lingkungan telah terlampaui, mengakibatkan penurunan fungsi

ekologis yang vital bagi kesejahteraan warga. Untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, diperlukan upaya ekstra yang terukur dan berkelanjutan, dengan indikator utama berupa peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Peningkatan kualitas lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial dengan keberlanjutan ekosistem serta ketahanan terhadap risiko bencana lingkungan.

Jakarta menghadapi berbagai musibah lingkungan yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, banjir, kebakaran, dan kekeringan. Banjir dan kekeringan merupakan tantangan utama yang sangat berkaitan dengan isu pelayanan dasar, khususnya akses terhadap air bersih, sanitasi, dan sistem drainase. Upaya normalisasi saluran air dan penguatan sistem drainase menjadi langkah krusial dalam mitigasi risiko tersebut. Namun, sebagai Kota Global, Jakarta dituntut untuk memiliki sistem resiliensi yang tangguh dan adaptif agar fungsi perkotaan tetap berjalan dan mampu pulih dengan cepat pasca-bencana.

Ketahanan kota terhadap perubahan lingkungan perlu diintegrasikan dengan sistem digital dan teknologi mutakhir. Pendekatan ini mencakup sistem terpadu untuk pencegahan, peringatan dini, penanganan, dan penanggulangan bencana, sehingga memungkinkan respons yang cepat, akurat, dan berkelanjutan.

7. Pergerakan manusia, barang, dan informasi yang optimal.

Dalam mewujudkan cita-cita sebagai kota global, Jakarta membutuhkan konektivitas pergerakan manusia, barang, dan informasi yang optimal. Salah satu langkah strategis adalah menggeser pola perjalanan penduduk menuju penggunaan transportasi umum massal yang andal dan efisien. Keberhasilan upaya ini ditandai dengan meningkatnya persentase *Public Transport Mode Share*, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penurunan kemacetan lalu lintas serta emisi gas rumah kaca, sekaligus memperkuat keberlanjutan lingkungan. Lebih jauh lagi, peningkatan konektivitas kota tidak hanya terbatas pada aspek mobilitas penduduk, tetapi juga mencakup kelancaran arus informasi dan sistem logistik yang dapat meningkatkan produktivitas warga serta memperkuat daya tarik Jakarta sebagai pusat aktivitas dan pariwisata.

Salah satu pendekatan utama untuk mencapai konektivitas yang optimal adalah melalui pengembangan kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD). Konsep ini memusatkan aktivitas masyarakat di sekitar titik-titik transit, dengan prinsip yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor

16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit. Implementasinya meliputi beberapa elemen penting, antara lain peningkatan konektivitas, pengembangan kawasan dengan intensitas yang lebih padat, pemanfaatan lahan campuran, serta pembangunan kawasan kompak yang meminimalkan jarak perjalanan. Dengan demikian, TOD diharapkan mampu mendorong masyarakat beralih secara aktif ke transportasi umum sekaligus menciptakan pola mobilitas yang lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, pada era digital saat ini, penguatan konektivitas digital menjadi faktor yang tidak kalah penting untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Melalui inisiatif *Jakarta Smart City*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menghadirkan solusi perkotaan modern berbasis teknologi. Program ini dirancang untuk mewujudkan Jakarta sebagai *smart city 4.0*, dengan memanfaatkan teknologi secara optimal dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. *Jakarta Smart City* berlandaskan tujuh indikator utama, yaitu *Smart Environment, Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart Governance, Smart Living* dan *Smart Branding*. Dengan kerangka tersebut, Jakarta berupaya membangun ekosistem kota yang lebih cerdas, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan urbanisasi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

D. Isu Strategis Jakarta Timur

Berdasarkan permasalahan yang ada di Kota Jakarta Timur berkaitan dengan unsur pembangunan, teridentifikasi 6 (enam) indikator strategis pembangunan yang dijabarkan secara rinci pada Tabel II.20 berikut sebagai dasar perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Tabel II.21 Identifikasi Permasalahan dan Sintesis Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029

No.	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Pemerintahan	- Terdapat beberapa Bangunan Kantor Kecamatan/Kelurahan dan Rumah Dinas Camat/Lurah yang memerlukan Pemeliharaan/ Rehabilitas; - Perlunya peningkatan jumlah dan kualitas Sarana dan Prasarana Kantor tingkat Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; - Perlunya peningkatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada kegiatan di tingkat Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; - Perlunya peningkatan pemahaman ASN dan Masyarakat terkait bidang Hukum; dan - Kebutuhan atas Data Infobank dalam kegiatan Musrenbang Kota, Kecamatan dan Kelurahan.	Pemerintahan dinamis dengan performa layanan prima
2.	Permukiman dan infrastruktur	- Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesulitan akses air bersih, sanitasi, dan listrik; - Masih terdapat sejumlah RW Kumuh; - Kebutuhan adanya Sarana Prasarana Permukiman yang Terpadu; - Perlunya peningkatan titik ruang hijau; dan - Masih terdapat titik rawan banjir.	Kawasan Permukiman Layak Huni dan Lingkungan Adaptif terhadap resiko bencana, perubahan iklim, dan cuaca ekstrem
3.	Kemiskinan	- Tingkat Pengangguran Terbuka cukup tinggi, terutama di kalangan usia produktif dengan pendidikan rendah; - Perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor terkait penanggulangan kemiskinan di Jakarta Timur; dan - Perlunya peningkatan kontribusi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pelaku industri terhadap masyarakat sekitar.	Produktivitas Ekonomi
4.	Ekonomi	- Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai di Kawasan Industri; - Potensi kawasan industri dan perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal masih dapat ditingkatkan; dan - Perlunya peningkatan pemanfaatan potensi kawasan industri dan perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.	Produktivitas Kawasan Industri
5.	Urbanisasi dan Infrastruktur	- Masih terdapat titik rawan kemacetan; dan - Perlunya peningkatan keterpaduan antar moda transportasi baik Antar Wilayah Jakarta dan daerah penyangga.	Integrasi dan Konektivitas Sistem Transportasi
6.	Pelestarian Budaya	- Belum optimalnya pemanfaatan potensi narasi sejarah dan keberadaan cagar budaya di Jakarta Timur; - Kurangnya dokumentasi dan promosi nilai budaya di lingkungan RW dan tingkat Kelurahan; dan - Perlu ketersediaan lahan yang cukup untuk pengembangan pelestarian cagar budaya Makam Pangeran Jayakarta.	Destinasi Wisata sejarah dan Ruang Publik Berbasis Budaya Lokal

Sumber: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

II.2.3. Rumusan Isu Strategis 2025–2029

Rumusan isu strategis daerah disusun berdasarkan dinamika lingkungan global, nasional, dan regional yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap wilayah Jakarta Timur. Selain itu, rumusan ini mempertimbangkan potensi daerah yang berada dalam kewenangan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang dapat dikembangkan untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan inklusif. Penjabaran isu strategis Kota Administrasi Jakarta Timur disajikan dalam Tabel II.23 berikut.

Tabel II.22 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Memiliki kapasitas APBD yang cukup untuk menganggarkan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Bangunan Kantor Kecamatan/ Kelurahan dan Rumah Dinas Camat/Lurah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor yang berkualitas; serta kegiatan pendukung lainnya.	1. Terdapat beberapa Bangunan Kantor Kecamatan/Kelurahan dan Rumah Dinas Camat/Lurah yang memerlukan Pemeliharaan/ Rehabilitas; 2. Perlunya peningkatan jumlah dan kualitas Sarana dan Prasarana Kantor tingkat Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; 3. Perlunya peningkatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada kegiatan di tingkat Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; 4. Perlunya peningkatan pemahaman ASN dan Masyarakat terkait bidang Hukum; dan 5. Kebutuhan atas Data Infobang dalam kegiatan Musrenbang Kota, Kecamatan dan Kelurahan.	Belum optimalnya tata kelola yang baik (*good governance*).		1. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; 2. Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Terbatas.	1. Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas; 2. Mewujudkan Manajemen Kota modern yang akuntabel dan responsif untuk layanan yang optimal; 3. Reformasi Birokrasi dengan memaksimalkan kinerja, meningkatkan mutu pelayanan, dan memperkuat kompetensi serta akuntabilitas pemerintahan; dan 4. Masih kurangnya koordinasi antar wilayah aglomerasi Jabodetabekpunjur.	**Pemerintahan Dinamis dengan Performa Layanan Prima**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Memiliki luasan wilayah terbesar dan memiliki lahan yang cukup untuk diberdayakan secara optimal dalam rangka penyediaan Kawasan Permukiman Layak Huni.	1. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesulitan akses air bersih, sanitasi, dan listrik; 2. Masih terdapat sejumlah RW Kumuh; 3. Kebutuhan adanya Sarana Prasarana Permukiman yang Terpadu; 4. Perlunya peningkatan titik ruang hijau; dan 5. Masih terdapat titik rawan banjir.	1. Tingginya risiko bencana; 2. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah; dan 3. Ketimpangan sosial-ekonomi.	1. Membuat kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 2. Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua; 3. Ancaman *Triple Planetary crisis;* 4. Penanganan Perubahan Iklim dan dampaknya; dan 5. Membuat kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	1. Pemanfaatan lahan perkotaan yang belum efisien dan pengendalian ruang yang kurang efektif; 2. Belum optimalnya integrasi antara intervensi penyediaan perumahan dengan infrastruktur dasar permukiman dan akses transportasi publik yang berpotensi pada tumbuhnya permukiman kumuh; 3. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.; dan 4. Tingkat pencemaran dan degredasi lingkungan yang semakin tinggi di perkotaan dan rendahnya ketangguhan perkotaan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.	1. Mewujudkan Infrastruktur Jakarta yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; 2. Mewujudkan Pembangunan Jakarta yang Sinergis dan Berkesinambungan; 3. Mewujudkan ruang kota layak huni, berketahanan dan berkelanjutan; 4. Potensi Bencana di Kawasan Hulu yang Berdampak pada Kawasan Hilir; 5. Infrastruktur kota yang layak dan berkelanjutan; dan 6. Penciptaan lingkungan perkotaan yang mandiri adaptif dan tangguh terhadap perubahan iklim.	**Kawasan Permukiman Layak Huni dan Lingkungan Adaptif terhadap resiko bencana, perubahan iklim, dan cuaca ekstrem**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Koordinasi dalam pengembangan kawasan dengan fungsi industri dan komersial di Kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung.	1. Tingkat Pengangguran Terbuka cukup tinggi, terutama di kalangan usia produktif dengan pendidikan rendah; 2. Perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor terkait penanggulangan kemiskinan di Jakarta Timur; dan 3. Perlunya peningkatan kontribusi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pelaku industri terhadap masyarakat sekitar.	Ketimpangan sosial-ekonomi.	1. Disrupsi teknologi dan kemajuan komputerisasi kecerdasan buatan yang sangat cepat; 2. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, ketenagakerjaan yang penuh dan produktif, serta pekerjaan layak bagi semua orang; 3. Pemerataan segala bentuk kemiskinan di semua tempat; dan 4. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara.	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas); 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; dan 3. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mewujudkan masyarakat megapolitan yang berdaya dan sejahtera; 2. Mewujudkan pusat ekonomi yang inovatif dengan pembangunan dan akses Sumber Daya yang Merata; 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berdaya saing global; dan 4. Optimalisasi riset dalam mendukung penciptaan inovasi dan pengembangan.	**Produktivitas Ekonomi**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengembangan kawasan industri Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).	1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai di Kawasan Industri; 2. Potensi kawasan industri dan perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal masih dapat ditingkatkan; dan 3. Perlunya peningkatan pemanfaatan potensi kawasan industri dan perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.	Ketimpangan sosial-ekonomi.	1. Disrupsi teknologi dan kemajuan komputerisasi kecerdasan buatan yang sangat cepat; dan 2. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan inovasi.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Modal Manusia tinggi dan masyarakat madani; 2. Perekonomian produktif, kompetitif, dan atraktif di pasar global; dan 3. Optimalisasi riset dalam mendukung penciptaan inovasi dan pengembangan.	**Produktivitas Kawasan Industri**
1. Jakarta Timur merupakan wilayah penghubung bagi Jakarta dan kota sekitarnya; dan 2. Pergerakan barang internal dan eksternal tertinggi di Jakarta.	1. Masih terdapat titik rawan kemacetan; dan 2. Perlunya peningkatan keterpaduan antar moda transportasi baik antar wilayah Jakarta dan daerah penyangga.	1. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah; dan 2. Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK menuju kota berkelanjutan.	1. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan inovasi; dan 2. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara.	1. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; dan 2. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur khusus di wilayah metropolitan belum merata, memiliki kualitas yang terbatas, serta tidak terintegrasi secara wilayah.	1. Kemacetan lalu lintas; 2. Optimalisasi pergerakan manusia, barang, dan informasi; dan 3. Pemerataan dan kebermanfaatan hasil pembangunan.	**Integrasi dan Konektivitas Sistem Transportasi**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Jakarta Timur memiliki 9 cagar budaya yang telah ditetapkan berdasarkan SK Kementerian serta 18 museum, sebagian besar berada di dalam Taman Mini Indonesia Indah (TMII); 2. Terdapat kawasan dengan potensi wisata sejarah.	1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi narasi sejarah dan keberadaan cagar budaya di Jakarta Timur; 2. Kurangnya dokumentasi dan promosi nilai budaya di lingkungan RW dan tingkat Kelurahan; dan 3. Perlu ketersediaan lahan yang cukup untuk pengembangan pelestarian cagar budaya Makam Pangeran Jayakarta.		Membuat kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis 2. Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, sosial, dan Budaya 3. Pengembangan sektor pariwisata; 4. Perekonomian produktif, kompetitif, dan atraktif di pasar global; dan 5. Peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan budaya di kancah global.	**Destinasi Wisata Sejarah dan Ruang Publik Berbasis Budaya Lokal**

Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

III.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029

Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2025–2029 disusun sebagai pedoman operasional untuk implementasi kebijakan pembangunan daerah. Dokumen ini merupakan turunan dari visi dan misi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta, yang berfungsi menerjemahkan arah kebijakan menjadi tujuan dan sasaran terukur, sistematis, serta realistis.

Penetapan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada analisis mendalam terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) guna mencapai hasil pembangunan optimal. Faktor-faktor ini selanjutnya menjadi landasan perumusan program prioritas serta kerangka acuan untuk merespons berbagai isu strategis. Selain itu, Renstra ini secara krusial mengintegrasikan misi jangka panjang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 2025–2045 dan mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029.

Dokumen ini secara krusial mengintegrasikan misi jangka panjang dalam RPJP DKI Jakarta 2025–2045 dan mendukung pencapaian sasaran RPJMD 2025–2029. Dengan demikian, untuk mewujudkan amanat kedua dokumen tersebut, Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan tujuan strategisnya untuk periode 2025–2029 sebagai berikut:

“Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Timur”

Lebih lanjut, dokumen ini dirancang untuk mendukung pencapaian target pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029 sekaligus mengintegrasikan misi jangka panjang pada RPJP Provinsi DKI Jakarta 2025–2045. Tujuan yang ditetapkan ini secara inheren berkaitan dengan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang bermutu dan sinkron dengan kerangka perencanaan Provinsi DKI Jakarta.

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan renstra adalah hal yang penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing Perangkat Daerah. Implikasi keterkaitan RPJMD dengan Renstra antaranya adalah:

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh;
2. Mencegah tumpang tindih dan duplikasi antar perangkat daerah;

3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Adapun hubungan sinergis antara tujuan strategis ini dengan Visi, Misi, serta sasaran dokumen pembangunan lainnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar III.1 Hubungan sinergis antara Tujuan dengan Dokumen Pembangunan Lainnya
Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur sangat penting untuk menjadi arah dan tolak ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra dilakukan melalui tahap di antaranya:

1. Menggunakan teknik *logical framework;*
2. Analisis masalah dan kebutuhan; dan
3. Kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sejumlah sasaran yang bersifat lebih operasional dan dapat diukur capaian kinerjanya. Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sasaran merupakan rumusan yang lebih operasional dari tujuan dan menggambarkan capaian yang ingin diwujudkan secara terukur selama lima tahun pelaksanaan Renstra. Sasaran dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur dirumuskan untuk menjawab tantangan pembangunan lokal dan mendukung pencapaian tujuan strategis. Dijelaskan pada Tabel III.1 terkait dengan target kinerja Sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur.

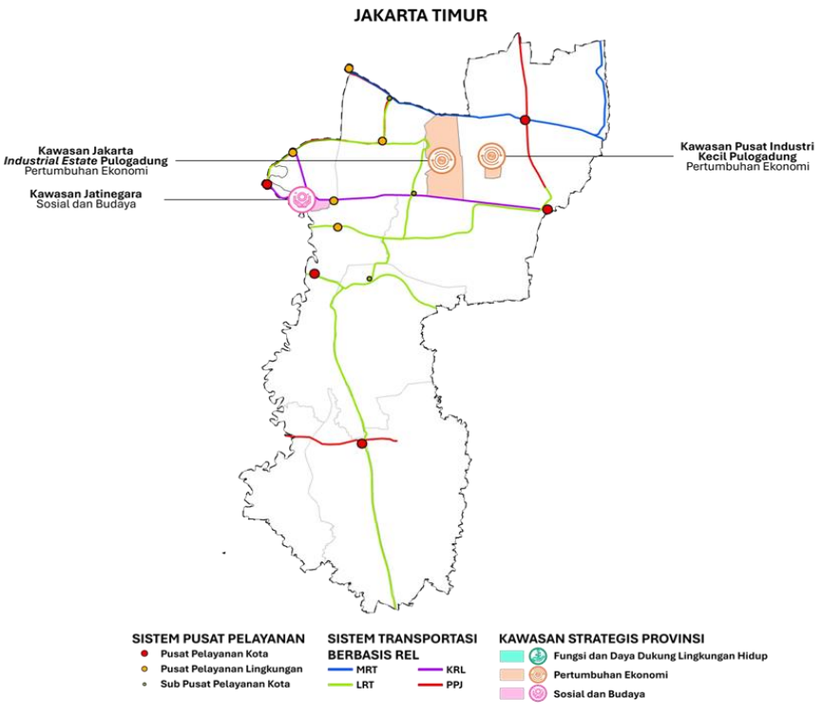
Tabel III.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Jakarta Timur 2025–2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun					Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Kemudahan dan Kualitas Layanan Masyarakat	Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Timur		Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi	4	4	4	4	4	
		Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	4	4	4	4	4	
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal	Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	4	4	4	4	4	

Sumber: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

III.2. Pengembangan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Penentuan Arah Kebijakan

Pembangunan wilayah berfungsi sebagai dasar pemetaan arah pengembangan yang lebih spesifik sesuai karakteristik Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam Dokumen Renstra, penyusunan arah kebijakan kewilayahan didasarkan pada kepentingan pembangunan jangka menengah dengan merujuk pada sejumlah dokumen perencanaan utama antara lain Arah Pembangunan Kewilayahan Jakarta yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Kawasan Strategis yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024–2044; dan Koridor Prioritas Pembangunan yang termuat dalam Kajian Kota Global Jakarta *Rise #20*, dan Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029.



Gambar III.2 Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kota Jakarta Timur
Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, 2025

Pengembangan Kawasan Strategis Kota Jakarta Timur yang tercantum pada Dokumen RTRW Provinsi DKI Jakarta 2024–2044 terdiri dari 2 (dua) kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan 1 (satu) kawasan strategis sosial budaya, yaitu :

1. Kawasan Strategis dari sudut pandang Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta Timur;
   - Kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung dikembangkan sebagai sebagai kawasan industri terpadu yang mengintegrasikan bisnis kreativitas, dan komunitas.
   - Kawasan Pusat Industri Kecil Pulogadung dikembangkan sebagai sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
2. Kawasan Strategis dari sudut pandang Sosial Budaya di Jakarta Timur.
   - Kawasan Jatinegara dikembangkan sebagai pusat kebudayaan Betawi dan pelestarian bangunan bersejarah meliputi Taman Benyamin Sueb dan Stasiun Jatinegara.

Koridor pembangunan yang dapat berkontribusi mengakselerasi pencapaian Kota Global di Jakarta Timur antara lain adalah:

1. Kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung sebagai distrik industri berteknologi tinggi dan inovasi

   Pengembangan Kawasan Strategis tersebut didukung dengan rencana sistem pusat layanan dan sistem transportasi berbasis rel yang saling terkoneksi untuk kemudahan aksesibilitas masyarakat. Adapun rencana sistem pusat layanan dikembangkan di Kota Jakarta Timur sebagai berikut :

- Pusat pelayanan kota di Jakarta Timur berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah Kota. Pusat pelayanan kota di Jakarta Timur berpusat berada pada titik simpul transit yang berada di 4 pusat layanan meliputi: Sentra Primer Timur di Kecamatan Cakung, Cakung di Kecamatan Cakung, Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas, dan Kawasan Cawang di Kecamatan Jatinegara pada Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Sub pusat pelayanan kota di Jakarta Timur sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah berada di Pulogadung di Kecamatan Pulogadung, Pulomas di Kecamatan Pulo Gadung dan Halim di Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Sub pusat pelayanan lingkungan di Jakarta Timur sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman di Wilayah Jakarta Timur berada di Pramuka di Kecamatan Matraman, Jatinegara di Kecamatan Jatinegara, Cipinang di Kecamatan Jatinegara, Velodrome Rawamangun di Kecamatan Pulo Gadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

Placemaking di Kota Administrasi Jakarta Timur diarahkan untuk membangun identitas kawasan yang kuat, fungsional, dan berdaya saing, melalui optimalisasi potensi lokal dan pengembangan fungsi kawasan yang terintegrasi dengan dinamika perkotaan Jakarta sebagai Kota Global. Strategi *placemaking* tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada pembentukan ekosistem sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang inklusif serta berkelanjutan. Dalam konteks ini, terdapat 3 (tiga) kawasan strategis yang menjadi fokus pengembangan, yaitu :

1. Cakung sebagai International *Health Hub*

   Kawasan Cakung diarahkan sebagai pusat layanan kesehatan berkelas internasional yang berperan dalam menjadikan Jakarta Timur sebagai destinasi layanan kesehatan modern. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan berstandar internasional merupakan kebutuhan fundamental masyarakat sekaligus menjadi prioritas pembangunan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pengembangan kawasan ini dengan menghadirkan konsep *smart hospital* dan *one stop living*, yang tidak hanya menjadi acuan bagi rumah sakit daerah di Jakarta, tetapi juga di tingkat Nasional.

   Pengembangan Cakung sebagai *International Health Hub* ditopang oleh kehadiran rumah sakit rujukan, pusat riset kesehatan, serta fasilitas pendidikan kedokteran yang berfungsi sebagai daya tarik bagi pasien, tenaga medis, maupun investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, dukungan infrastruktur

transportasi yang memadai dan keterhubungan dengan kawasan industri menjadikan Cakung memiliki nilai strategis dalam mendukung Provinsi DKI Jakarta menjadi Kota Global.

2. Jatinegara sebagai *Mixed-Use Destination*

Kawasan Jatinegara merupakan salah satu kawasan bersejarah di Jakarta Timur yang memiliki nilai strategis baik dari aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Kawasan ini dikenal sebagai pusat perdagangan tertua yang hingga kini masih berfungsi sebagai destinasi belanja utama masyarakat. Pasar ini menyediakan beragam kebutuhan masyarakat, mulai dari barang harian hingga produk khas, sehingga memperkuat posisinya sebagai destinasi belanja favorit. Selain itu, Pasar Jatinegara tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, tetapi juga menghadirkan keunikan melalui keberadaan Pasar Hewan yang memiliki nilai edukatif. Keberadaannya yang terkoneksi dengan berbagai moda transportasi publik semakin meningkatkan daya tarik kawasan ini sebagai pusat kegiatan ekonomi. Letaknya yang strategis berdekatan dengan Terminal Kampung Melayu dan Stasiun Jatinegara, didukung oleh konektivitas transportasi publik seperti TransJakarta, KRL *Commuter Line*, Mikrotrans, menjadikan kawasan ini mudah dijangkau serta memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat dan meningkatkan daya tarik kawasan ini sebagai pusat kegiatan ekonomi.

Dari sisi sejarah, Jatinegara menyimpan kekayaan warisan budaya melalui keberadaan bangunan-bangunan bersejarah yang bernilai tinggi. Beberapa di antaranya adalah Gereja Koinonia, bangunan eks Kodim yang kini bertransformasi menjadi Museum Benyamin Sueb, Komplek TNI AD Jenderal Urip Sumoharjo, serta Stasiun Jatinegara sebagai salah satu simpul transportasi tertua di Jakarta. Kehadiran bangunan-bangunan tersebut memberikan identitas khas yang berpotensi besar dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya.



Gambar III.3 Museum Benyamin Sueb
Sumber: https://jakarta-tourism.go.id/, 2019

Dalam konteks *placemaking*, Jatinegara memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai *Mixed-Use Destination*, yaitu kawasan multifungsi yang mengintegrasikan perdagangan, jasa, hunian, transportasi, serta pariwisata berbasis sejarah dan budaya. Dengan mempertahankan dan merevitalisasi bangunan-bangunan konservasi yang ada, Jatinegara dapat dikembangkan sebagai ikon Jakarta Timur yang tidak hanya melestarikan nilai sejarah, tetapi juga menciptakan ruang kota yang dinamis, inklusif, dan berdaya saing.

3. Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung sebagai Rumah Pelaku Industri

   Kawasan PIK Pulogadung diproyeksikan sebagai Rumah Pelaku Industri yang memberdayakan UMKM sekaligus memperkuat jejaring industri di Jakarta Timur. *Placemaking* kawasan ini diarahkan pada penguatan ekosistem kewirausahaan, penyediaan fasilitas produksi bersama, ruang pamer, inkubator bisnis, hingga akses permodalan dan pasar digital. Dengan demikian, PIK Pulogadung tidak hanya menjadi kawasan produksi, tetapi juga menjadi pusat kolaborasi dan inovasi, yang mendorong pertumbuhan industri kreatif dan manufaktur skala kecil, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.

III.3. Arah Kebijakan RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025–2029

Pembangunan wilayah adalah sarana untuk memetakan arah pembangunan Jakarta yang lebih spesifik sesuai dengan konteks dan karakter wilayah masing-masing. Penyusunan arah kebijakan kewilayahan yang tertuang pada dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis yang merepresentasikan kepentingan pembangunan jangka menengah dan panjang, yaitu perbaikan fundamental dan visi untuk menjadi Kota Global. Beberapa pertimbangan strategis tersebut diantaranya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Arah Pembangunan Kewilayahan Jakarta yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029; Kawasan Strategis yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2024-2044; dan Koridor Prioritas Pembangunan yang termuat dalam Kajian Kota Global Jakarta Rise #20. Arah pembangunan kewilayahan dapat menjadi landasan bagi Jakarta dalam menghadapi dinamika perkotaan di masa depan dan memastikan pertumbuhan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dirancang dengan menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan permasalahan dan potensi spesifik di setiap wilayah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tema pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur diarahkan untuk dikembangkan sebagai *"**Sentra Kawasan Industri Produktif, Permukiman, Dan Hub Transportasi Regional**"*.

Selain itu, rekomendasi kebijakan strategis wilayah dirumuskan berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) dan *shift-share* dengan melihat data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Kebijakan ini menekankan optimalisasi sektor-sektor unggulan, peningkatan produktivitas, serta pemerataan hasil pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan PDRB, tetapi juga berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat dan daya saing wilayah. Lebih lanjut PDRB Jakarta Timur berdasarkan lapangan usaha disajikan dalam Tabel III.2.

Tabel III.2 PDRB Jakarta Timur Berdasarkan Lapangan Usaha (dalam Miliar Rupiah)

RINCIAN		2020	2021	2022	2023*	2024**
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry, and Fishing*	399,10	404,17	415,38	427,51	458,99
b	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	-	-	-	-	-
c	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	125.052,56	141.305,78	155.237,60	161.456,82	168.584,05
d	Pengadaan Listrik Gas/*Electricity and Gas*	3.110,35	2.512,60	2.411,46	2.090,48	1.494,34
e	Pengadaan Air Pengolahan Sampah Pengadaan Air; Limbah dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	242,80	251,73	256,58	275,75	292,62
f	Konstruksi/ *Construction*	50.790,66	53.087,84	57.326,24	60.662,12	65.189,89
g	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	79.436,92	84.576,42	96.071,94	105.283,49	114.869,77
h	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	23.929,84	26.006,59	28.173,68	39.672,71	42.991,19
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	19.779,15	21.933,12	24.721,98	27.868,79	30.857,19
j	Informasi dan Komuniakasi/ *Information and Communication*	26.379,87	27.866,61	30.264,33	32.942,01	35.106,52
k	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	8.341,51	8.670,19	9.374,34	10.077,72	10.714,39
l	Real Estat/*Real Estate Activities*	24.853,79	25.515,72	26.581,37	27.657,08	28.550,82
m,n	Jasa Perusahaan/ *Business Activities*	28.151,23	28.482,07	31.126,47	34.636,66	36.879,24
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	19.234,01	18.605,78	19.149,70	19.465,64	20.559,78
p	Jasa Pendidikan/*Education*	35.499,56	35.861,61	36.541,73	36.699,01	38.672,34
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	10.442,94	11.262,51	12.620,28	13.592,04	14.461,50
r,s, t,u	Jasa Lainnya/ Other Service Activates	14.350,74	14.075,90	16.779,22	19.579,02	20.926,30
PDRB/GDP		**469.995,03**	**500.418,64**	**547.072,29**	**592.386,85**	**630.608.92**

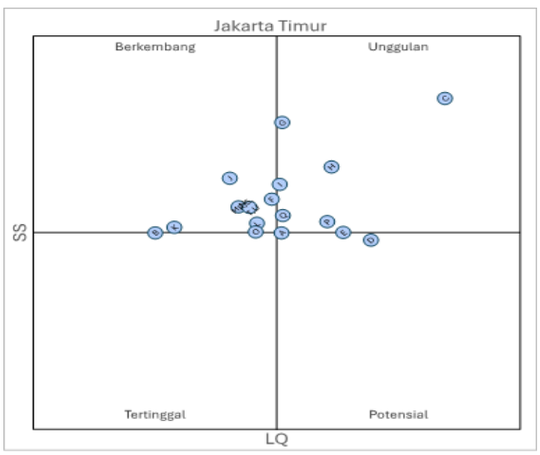
*angka sementara
**angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Jakarta Timur, 2025

Perekonomian daerah Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan dari Rp469.995,03 miliar pada Tahun 2020 menjadi Rp630.608,92 miliar pada Tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh sektor industri pengolahan (c), perdagangan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan (h) yang terus mencatat kenaikan signifikan. Sektor informasi dan komunikasi juga tumbuh pesat, mencerminkan peran digitalisasi dalam mendukung aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, sektor listrik dan gas (d) justru mengalami penurunan tajam, yang mengindikasikan adanya efisiensi atau perubahan pola konsumsi energi. Sektor jasa, termasuk pendidikan, kesehatan, keuangan, dan administrasi pemerintahan, konsisten mengalami peningkatan, menunjukkan penguatan peran sektor tersier dalam struktur perekonomian. Secara keseluruhan, PDRB dalam periode ini tumbuh sekitar 34,2 persen, menandakan kondisi ekonomi yang semakin menguat dengan basis utama pada industri dan jasa.

Untuk mengetahui lebih lanjut struktur dan keunggulan kompetitif perekonomian, dapat digunakan Analisis LQ dan *Shift-Share*. Analisis LQ dan SS digunakan untuk menilai signifikansi suatu industri di suatu wilayah Kota dan Kabupaten dibandingkan dengan wilayah referensi yang lebih besar, yaitu Jakarta. Analisis LQ dan SS membandingkan proporsi PDRB dalam suatu industri di tingkat wilayah dengan proporsi industri yang sama di tingkat provinsi. Analisis ini membantu mengidentifikasi keunggulan ataupun kelemahan ekonomi dalam sektor tertentu. Dengan dua pendekatan ini, arah pembangunan ekonomi dapat difokuskan pada sektor unggulan sekaligus mengidentifikasi potensi pergeseran struktur ekonomi di masa depan.



Kode	Lapangan Usaha	Kategori
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	Potensial
B	Petambangan dan penggalian	-
C	Industri Pengolahan	Unggulan
D	Pengadaan listrik dan gas	Potensial
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang	Unggulan
F	Konstruksi	Berkembang
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Unggulan
H	Transportasi dan pergudangan	Unggulan
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	Unggulan
J	Informasi dan komunikasi	Berkembang
K	Jasa keuangan dan asuransi	Berkembang
L	Real Estat	Berkembang
M,N	Jasa Perusahaan	Berkembang
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	Berkembang
P	Jasa Pendidikan	Unggulan
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan	Unggulan
R,S,T,U	Jasa lainnya	Berkembang

Gambar III.4 Hasil Analisis LQ dan *Shift Share* Kota Administrasi Jakarta Timur
Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan pada dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029, sektor ‘Industri Pengolahan’ (C) teridentifikasi menjadi sektor unggulan yang paling signifikan di Jakarta Timur berdasarkan analisis LQ SS. Sektor ‘Transportasi dan Pergudangan’ (H), ‘Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum’ (I), ‘Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor’ (G) juga merupakan sektor unggulan yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Terkait dengan sektor yang berkembang, sektor ‘Konstruksi’ (F) memiliki nilai LQ mendekati 1, sehingga dapat diprioritaskan untuk ditingkatkan dan menjadi sektor unggulan. Begitu pula dengan sektor ‘Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang’ (E) dan ‘Pengadaan Listrik dan Gas’ (D) yang telah termasuk sektor basis dan laju pertumbuhannya hampir setara pertumbuhan Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat ditingkatkan agar laju pertumbuhannya lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta.

Di samping sektor permukiman dan kebudayaan, Jakarta Timur juga berperan sebagai kawasan industri. Wilayah ini memiliki 5.856 titik sebaran kawasan industri, dengan Kecamatan Cakung sebagai wilayah dengan jumlah kawasan industri terbanyak, yakni 2.218 titik. Salah satu kawasan industri utama di Jakarta Timur adalah Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). PT JIEP merupakan pengelola Kawasan Industri Pulogadung yang telah berdiri selama lebih dari 50 tahun, mengelola lahan industri seluas 433 hektare, dan dipercaya oleh lebih dari 500 perusahaan Nasional maupun Multinasional. JIEP sendiri akan didorong menjadi kawasan industri terpadu yang mengintegrasikan bisnis, kreativitas, dan komunitas dengan fungsi industri dan komersial yang dapat mengakomodir tenaga kerja baru. Jakarta Timur juga memiliki kawasan pusat industri kecil Pulogadung sebagai sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat menjadi wadah pengembangan ruang bisnis kreatif sebagai wadah inovasi untuk meningkatkan daya saing kawasan serta mendukung keberlanjutan usaha UMKM. Berdasarkan berbagai potensi yang dimiliki, pengembangan wilayah Jakarta Timur dapat diarahkan menjadi kawasan berkarakter permukiman layak huni, pusat kebudayaan, serta kawasan industri yang kompetitif. Dengan perencanaan yang tepat, Jakarta Timur dapat terus berkembang sebagai wilayah yang memiliki daya saing di tingkat Nasional maupun Global.

Dalam rangka mendukung pengembangan Jakarta secara keseluruhan, beberapa indikator diidentifikasi sebagai indikator strategis wilayah (kontribusi PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Prevalensi *Stunting*). Secara lebih detail capaian dan proyeksi target indikator dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.3 Target Indikator Strategis Wilayah Jakarta Timur

Indikator	Kondisi Awal (2024)	Kondisi Akhir (2030)
Kontribusi PDRB (%)	17,00	16,47
Tingkat Kemiskinan (%)	4,09	3,24
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,95	6,00
Prevalensi *Stunting* (%)	16,4	11,75

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta, 2025

Selanjutnya dalam rangka mendukung pencapaian target peningkatan literasi keuangan Nasional yang tercantum dalam dokumen RPJMN, Provinsi DKI Jakarta termasuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan warga dalam mengelola keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai wilayah metropolitan yang dinamis dan berkembang pesat, Provinsi DKI Jakarta menghadapi beragam tantangan dan peluang dalam memperkuat literasi keuangan masyarakatnya.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menargetkan percepatan peningkatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Dalam rangka mencapai target tersebut, strategi utama yang direkomendasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah penguatan ekosistem UMKM secara besar-besaran dan perluasan akses keuangan bagi masyarakat umum secara signifikan yang didukung dengan penguatan infrastruktur layanan keuangan. Rangkaian program komprehensif ini dirancang untuk mengakselerasi inklusi keuangan secara merata, memastikan seluruh lapisan masyarakat di Jakarta Timur mendapatkan akses yang lebih baik dan mendalam terhadap layanan keuangan formal.

III.4. Strategi Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029

Strategi merupakan bagian penting dari implementasi Renstra yang berfungsi sebagai instrumen penghubung antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan tataran implementasi. Strategi merepresentasikan pendekatan fundamental dan rencana aksi utama yang dirancang untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah. Dalam konteks Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, perumusan strategi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan secara mendalam arah kebijakan jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Landasan perumusan strategi didasari pada hasil analisis faktor internal (kapasitas sumber daya manusia, fiskal, kebijakan, dan potensi wilayah) dan eksternal (kebijakan nasional, perkembangan ekonomi, kondisi sosio-kultural, dan tantangan global). Oleh karena itu, strategi pembangunan ini diposisikan sebagai landasan dan rujukan utama dalam penyusunan turunan kebijakan, program, serta tindakan implementasi

perencanaan pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Jakarta sebagai Kota Global. Selanjutnya, rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Penahapan strategi Renstra disajikan pada Tabel III.4

Tabel III.4 Penahapan Strategi Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• Identifikasi wilayah prioritas dengan kesenjangan tinggi • Penyusunan *baseline* data pembangunan perkelurahan • Penguatan kelembagaan masyarakat awal (RT/RW/LMK) • Revitalisasi rumah dinas Camat/Lurah yang rusak berat • Perluasan layanan dasar (air bersih, sanitasi, RPTRA) tahap awal	• Implementasi koordinasi pembangunan infrastruktur wilayah prioritas • Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas (PKK, Posyandu, Jumantik) • Peningkatan kapasitas SDM pelaksana di kelurahan • Pelibatan masyarakat dalam musrenbang tematik yang optimal • Revitalisasi bangunan kantor kelurahan/kecamatan yang rusak berat di wilayah prioritas • Penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku pelestari budaya	• Evaluasi dan penyempurnaan model pemberdayaan lokal • Penguatan program lingkungan berbasis partisipasi warga • Perluasan revitalisasi bangunan kantor rusak sedang dan peningkatan sarana kerja pelayanan publik • Penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku pelestari budaya	• Integrasi hasil pembangunan fisik dan sosial • Penguatan keberlanjutan program di wilayah non-prioritas • Perluasan dan revitalisasi kantor pelayanan yang masih belum berjalan secara optimal dan memerlukan tindak lanjut yang lebih terarah • Integrasi pelayanan berbasis digital di kantor-kantor kelurahan/ kecamatan • Penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku pelestari budaya	• Konsolidasi hasil pembangunan lima tahun • Pengukuran dampak sosial dan kesejahteraan • Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk periode Renstra berikutnya

Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

III.5. Arahan Kebijakan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029

Arah Kebijakan dalam Dokumen Renstr*a* disusun sebagai pedoman strategis bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan selama periode lima tahun. Arah kebijakan ini merupakan turunan langsung dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029. Dalam perumusannya, arah kebijakan mempertimbangkan berbagai faktor strategis, antara lain kondisi objektif daerah, permasalahan aktual, isu strategis sektoral, serta aspirasi masyarakat.

Selain itu, arah kebijakan Renstra juga diselaraskan dengan arahan kebijakan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan utama dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Kesesuaian dengan RPJMD menjadi dasar integrasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam mendukung capaian prioritas pembangunan daerah secara holistik dan terukur. Dalam rangka menjamin keselarasan dengan kebijakan nasional dan menjamin kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, arah kebijakan Renstra juga memperhatikan dan mengacu pada operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan secara minimal, seragam, dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang berlaku secara nasional.

Dengan memperhatikan aspek keselarasan tersebut, Arah Kebijakan Renstra berfungsi sebagai kerangka strategis yang menjamin konsistensi perencanaan pembangunan, efisiensi pelaksanaan program, serta penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Pada akhirnya, Arah Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Arah Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur tertuang pada Tabel III.5.

Tabel III.5 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAHAN KEBIJAKAN RPJMD	ARAHAN KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	● Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ● Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan ● Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi	Sistem perlindungan sosial tepat sasaran, pengentasan kemiskinan berbasis wilayah, inklusivitas ekonomi, kemudahan investasi dan membuka usaha, tenaga kerja berdaya saing	● Mengoptimalkan pembinaan, penataan dan pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi dan budaya; ● Mengoptimalkan kualitas sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur; ● mengoptimalkan pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.	

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAHAN KEBIJAKAN RPJMD	ARAHAN KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	● Penyelenggaraan urusan pemerintah umum di wilayahnya ● Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan ● Pengoordinasian penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintah di Wilayah Kota Administrasi	Pemanfaatan teknologi untuk layanan publik dan manajemen kota	● Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Jakarta Timur; ● Penguatan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Kemasyarakatan; ● Modernisasi Sistem Layanan Publik Kecamatan dan Kelurahan; ● Optimalisasi Penyelenggaraan Kearsipan dan Administrasi Pemerintahan; ● Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah.	
3.	● Mengoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ● Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Infrastruktur dasar, hunian terjangkau, perbaikan kualitas air dan udara, ruang terbuka hijau, ketahanan terhadap bencana	● Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam penanganan bencana ● Penguatan Sistem Mitigasi dan Adaptasi Bencana Secara Terpadu	

Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

III.6. Penyusunan Pohon Kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 – 2029

Subbab ini menjelaskan tentang penyusunan pohon kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai alat untuk memahami jalur logis pencapaian kinerja dalam berbagai kondisi guna meraih *outcome* yang diharapkan. Penyusunan pohon kinerja mengacu pada prinsip empiris, yaitu berdasarkan pada kondisi faktual, isu strategis, serta permasalahan yang nyata terjadi di lapangan, dengan didukung oleh data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain memperhatikan kondisi saat ini, pohon kinerja juga harus disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kondisi masa depan, mengingat fungsinya sebagai acuan dalam perumusan Renstra. Pohon kinerja bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, sehingga dapat diperbarui atau disempurnakan sesuai kebutuhan. Dalam proses penyusunannya, perlu pula mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan pemerintahan lainnya yang memiliki pengaruh strategis dan dampak signifikan. Hal ini membuka peluang untuk mengintegrasikan berbagai aspek lintas sektor

yang relevan dalam rangka menghasilkan pohon kinerja yang komprehensif dan efektif. Sebagai bagian dari pendekatan strategis, dilakukan identifikasi peran Perangkat Daerah berdasarkan berdasarkan *Critical Success Factors* (CSF) terhadap Sasaran Renstra sebagai berikut tertuang pada tabel berikut :

Tabel III.6 Merumuskan Tujuan Renstra Jakarta Timur berdasarkan Isu Strategis

MANDAT (DASAR HUKUM)	ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	(*ULTIMATE OUTCOME*) TUJUAN RENSTRA
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan 6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja.	1. Pemerintahan dinamis dengan performa layanan prima; 2. Kawasan Permukiman Layak Huni dan Lingkungan Adaptif terhadap resiko bencana, perubahan iklim, dan cuaca ekstrem; 3. Produktivitas Ekonomi; 4. Produktivitas Kawasan Industri; 5. Integritas dan Konektivitas Sistem Transportasi; 6. Destinasi Wisata Sejarah dan Ruang Publik Berbasis Budaya Lokal	Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Timur

HARAPAN :

Tujuan Renstra Tahun 2025–2029 yaitu Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Timur tercapai dengan baik.

Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Tabel III.7 Merumuskan Sasaran Renstra berdasarkan CSF Tujuan Renstra

(*ULTIMATE OUTCOME*) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(*CRITICAL SUCCESS FACTOR*) STRATEGI	(*INTERMEDIATE OUTCOME*) SASARAN RENSTRA
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Timur	Pemerataan hasil pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga Jakarta Timur di seluruh lapisan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.	1. Standar pelayanan publik yang terukur dan konsisten 2. Kompetensi dan kapasitas ASN dalam memberikan pelayanan 3. Infrastruktur layanan yang merata dan inklusif 4. Sosialisasi dan literasi layanan kepada masyarakat 5. Pemantauan dan evaluasi berbasis kinerja	1. Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
		1. Perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan lokal 2. Optimalisasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan *Stakeholder* 3. Partisipasi dan peningkatan pemberdayaan masyarakat 4. Pemantauan dan evaluasi berbasis kinerja	2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal

Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Tabel III.8 Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra

TUJUAN/SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*CRITICAL SUCCESS FACTOR*	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Timur				
1. **Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat** 2. **Meningkatnya kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan yang optimal**	Pemerataan hasil pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga Jakarta Timur di seluruh lapisan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan	1. Penguatan kapasitas dan peran RT/RW sebagai simpul sosial serta penguatan fungsi FKDM dalam kegiatan masyarakat 2. Partisipasi aktif warga dalam menjaga lingkungan 3. Kolaborasi aktif Pemerintah dengan Tokoh dan Lembaga Keagamaan	Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan	
		1. Keterlibatan aktif warga dan pemangku kepentingan dalam kegiatan Musrenbang 2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) PPSU yang cukup dan terlatih	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

TUJUAN/SASARAN RENSTRA (1)	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA (2)	*CRITICAL SUCCESS FACTOR* (3)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (4)	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN (5)
		3. Monitoring dan evaluasi pembangunan yang transparan		
		1. Efektivitas koordinasi antara Kecamatan dan Kelurahan dengan PPK Kader Jumantik dan Kader Posyandu dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Masyarakat 2. Pengelolaan RPTRA sebagai wadah aktivitas Masyarakat 3. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		1. Koordinasi yang efektif antara Kecamatan dan Kelurahan dengan TNI/POLRI 2. Sistem pelaporan gangguan ketertiban yang cepat dan terintegrasi 3. Monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		1. Efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana gedung kantor 2. Efektivitas dan pengelolaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 3. Monitoring dan evaluasi kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
		1. Efektifitas koordinasi lintas sektor dan *stakeholder* 2. Ketersediaan penerapan SOP yang konsisten di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan 3. Monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi	

Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IV.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan di Kota Administrasi Jakarta Timur bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran dari program RPJMD berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan disusun dari hasil *cascading* dari tujuan, sasaran *outcome,* dan *output*. Program, kegiatan dan subkegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025– 2029 terdiri atas 6 program, 15 kegiatan dan 77 subkegiatan. Lebih lanjut daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur disajikan dalam Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kota Administrasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Kemudahan dan Kualitas Layanan Masyarakat	T1. Terwujudnya Pemerataan Hasil Pembangunan Yang Menyejahterakan Warga Kota Administrasi Jakarta Timur				Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi		
		S1.1 Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan Di Kecamatan dan Kelurahan		
			Terwujudnya Program Kecamatan dan Kelurahan yang Optimal		Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	PROG.1 Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan	
				Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelesaian Layanan oleh RT, RW, LMK dan FKDM di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	KEG. 1.1 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	SUBKEG. 1.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	
					Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat yang Disediakan	SUBKEG.1.1.2 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	
					Jumlah RT, RW, dan/atau LMK yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan	SUBKEG.1.1.3 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual	SUBKEG.1.1.4 Pelaksanaan Bina Mental Spritual	
					Jumlah Pelaksanaan Penanganan Bencana	SUBKEG.1.1.5 Penanganan Bencana	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	SUBKEG.1.1.6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	SUBKEG.1.1.7 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	SUBKEG.1.1.8 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terwujudnya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	PROG.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	KEG.2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	SUBKEG.2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Persentase Penyelesaian Masalah dalam Lingkup Pekerjaan PPSU yang Terselesaikan	SUBKEG.2.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat dan/atau Lurah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	SUBKEG.2.1.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terwujudnya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	PROG.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KEG.3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	SUBKEG.3.1.1 Pemberdayaan Masyarakat	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	KEG.3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	SUBKEG.3.2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	SUBKEG.3.2.2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			Terwujudnya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	PROG.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	KEG.4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	SUBKEG.4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	
		1.2 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Hasil Pembangunan Yang Optimal	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	PROG.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
					Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		
					Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEG.5.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SUBKEG.5.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SUBKEG.5.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEG.5.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SUBKEG.5.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SUBKEG.5.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KEG.5.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	SUBKEG.5.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terselenggaranya Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KEG.5.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	SUBKEG.5.4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	SUBKEG..5.4.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEG.5.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SUBKEG.5.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SUBKEG.5.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	SUBKEG.5.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	SUBKEG.5.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	SUBKEG.5.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	SUBKEG.5.5.6 Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	SUBKEG.5.5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUBKEG.5.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SUBKEG.5.5.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SUBKEG.5.5.10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KEG.5.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	SUBKEG.5.6.1 Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	SUBKEG.5.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SUBKEG.5.6.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SUBKEG.5.6.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SUBKEG.5.6.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEG.5.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SUBKEG.5.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SUBKEG.5.7.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SUBKEG.5.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEG.5.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SUBKEG.5.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	SUBKEG.5.8.2 Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	SUBKEG.5.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SUBKEG.5.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SUBKEG.5.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SUBKEG.5.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terwujudnya Program Pengelolaan Kota Administrasi		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	PROG.6 Program Pengelolaan Kota Administrasi	
					Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
					Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase capaian kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di atas 80%	KEG.6.1 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	
					Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkat Kapasitasnya	SUBKEG.6.1.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.2 Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.3 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.4 Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.5 Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.6 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.7 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.8 Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.9 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.10 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.11 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	SUBKEG.6.1.12 Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	
					Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.13 Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.14 Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.15 Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	SUBKEG.6.1.16 Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.17 Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.18 Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	SUBKEG.6.1.19 Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.20 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.21 Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pegawai Kota Administrasi yang Mengikuti *Character Building* yang Dilaksanakan	SUBKEG.6.1.22 Pelaksanaan *Character Building* Pegawai Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.23 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.24 Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.25 Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.26 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.27 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.28 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVANT	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.29 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.30 Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.31 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kota Administrasi	SUBKEG.6.1.32 Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kota Administrasi	

Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan merupakan komponen utama dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun untuk periode lima tahun. Dokumen ini memuat secara sistematis daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan, lengkap dengan indikator kinerja, target capaian tahunan, serta estimasi kebutuhan anggarannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sektoral. Selain itu, rencana ini menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta dalam perhitungan kebutuhan anggaran yang rasional, terukur, dan terstruktur.

Adapun nomenklatur program-program tercantum telah disesuaikan dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5990 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaannya disajikan dalam Tabel IV.2.

Tabel IV.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	4	4	414.281.903.345	4	450.827.208.433	4	462.021.517.263	4	471.813.191.189	4	480.237.760.032	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelesaian Layanan oleh RT, RW, LMK dan FKDM di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	100	414.281.903.345	100	450.827.208.433	100	462.021.517.263	100	471.813.191.189	100	480.237.760.032	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	4630	4734	1.911.214.167	4634	1.968.550.592	4634	2.027.607.110	4634	2.088.435.323	4634	2.151.088.383	
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat yang Disediakan	900	900	11.315.775.400	900	11.315.775.400	900	11.655.248.662	900	12.004.906.122	900	12.365.053.305	
Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK	Jumlah RT, RW, dan/atau LMK yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan	9194	9194	396.197.182.127	9194	431.118.778.748	9194	443.166.834.687	9194	444.552.256.975	9194	460.240.917.288	
Pelaksanaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spiritual	245	300	3.551.306.059	300	3.578.485.334	300	3.685.839.894	300	3.796.415.090	300	3.910.307.543	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penanganan Bencana	Jumlah pelaksanaan penanganan bencana	65	65	1.306.425.592	65	1.345.618.359	65	1.385.986.910	65	1.427.566.517	65	1.470.393.513	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	0	0	0	1	750.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	0	0	0	0	0	0	0	150	7.843.611.162	0	0	
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	0	0	0	1	750.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	4	385.905.206.145	4	385.948.654.555	4	405.116.252.707	4	425.346.335.731	4	446.587.001.016	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4	4	1.448.280.350	4	1.491.728.760	4	1.436.480.623	4	1.482.575.042	4	1.530.052.293	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	75	75	1.448.280.350	75	1.491.728.760	75	1.436.480.623	75	1.482.575.042	75	1.530.052.293	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat dan/atau Lurah	Persentase Penyelesaian Masalah dalam Lingkup Pekerjaan PPSU yang Terselesaikan	0	100	384.456.925.795	100	384.456.925.795	100	403.679.772.084	100	423.863.760.689	100	445.056.948.723	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	780	780	384.456.925.795	780	384.456.925.795	780	403.679.772.084	780	423.863.760.689	780	445.056.948.723	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	4	4	153.469.138.584	4	154.354.759.689	4	161.464.371.181	4	168.911.219.452	4	176.711.619.029	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4	4	123.948.435.074	4	123.948.435.074	4	130.145.856.828	4	136.653.149.669	4	143.485.807.152	
Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	2116	2116	123.948.435.074	2116	123.948.435.074	2116	130.145.856.828	2116	136.653.149.669	2116	143.485.807.152	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4	4	29.520.703.510	4	30.406.324.615	4	31.318.514.353	4	32.258.069.783	4	33.225.811.877	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	75	75	29.453.903.510	75	30.337.520.615	75	31.247.646.233	75	32.185.075.620	75	33.150.627.889	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	12	66.800.000	12	68.804.000	12	70.868.120	12	72.994.163	12	75.183.988	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	7.140.324.141	4	7.283.130.624	4	7.428.793.236	4	7.577.369.101	4	7.728.916.483	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	100	100	7.140.324.141	100	7.283.130.624	100	7.428.793.236	100	7.577.369.101	100	7.728.916.483	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	300	300	7.140.324.141	300	7.283.130.624	300	7.428.793.236	300	7.577.369.101	300	7.728.916.483	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik	56	60	465.016.031.315	62	473.530.627.751	64	482.025.078.506	66	490.208.691.084	68	499.388.258.683	
	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	27.360.000	4	28.180.800	4	29.026.224	4	179.897.010	4	30.404.473	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	11.880.000	2	12.236.400	2	12.603.492	3	162.981.596	2	12.981.597	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	9	15.480.000	9	15.944.400	9	16.422.732	9	16.915.414	9	17.422.876	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	4	310.692.574.725	4	320.614.740.066	4	320.227.861.191	4	318.536.012.798	4	317.187.722.158	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	989	828	310.195.404.275	800	320.089.041.199	779	319.686.391.358	737	317.978.298.870	706	316.613.276.812	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	304	304	510.387.250	304	525.698.867	304	541.469.833	304	557.713.928	304	574.445.346	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	0	0	4	13.216.800	4	13.216.800	4	13.216.800	4	13.216.800	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	13.216.800	1	13.216.800	1	13.216.800	1	13.216.800	1	13.216.800	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	4	734.218.029	4	735.088.198	4	757.140.843	4	779.855.069	4	803.250.721	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	3	29.005.642	4	29.875.811	4	30.772.085	4	31.695.248	4	32.646.105	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	18	20	705.212.387	22	705.212.387	22	726.368.758	22	748.159.821	22	770.604.616	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	4	24.192.621.475	4	24.918.400.117	4	25.665.952.122	4	26.435.930.685	4	27.229.008.605	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	53	65	1.746.636.413	65	1.799.035.505	65	1.853.006.571	65	1.908.596.768	65	1.965.854.671	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	110	102	5.013.315.618	102	5.163.715.086	102	5.318.626.539	102	5.478.185.335	102	5.642.530.895	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	110	88	1.540.941.611	89	1.587.169.859	89	1.634.784.955	89	1.683.828.504	89	1.734.343.359	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	117	112	3.699.855.073	114	3.810.850.725	113	3.925.176.246	113	4.042.931.534	113	4.164.219.480	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	87	90	1.331.099.946	92	1.371.032.944	92	1.412.163.933	92	1.454.528.850	92	1.498.164.716	
Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	76	76	7.017.317.028	76	7.227.836.539	76	7.444.671.635	76	7.668.011.784	76	7.898.052.137	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	304	304	1.611.268.800	304	1.659.606.864	304	1.709.395.070	304	1.760.676.922	304	1.813.497.229	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304	304	1.326.143.840	304	1.365.928.155	304	1.406.906.000	304	1.449.113.180	304	1.492.586.575	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	892.731.051	1	919.512.982	1	947.098.372	1	975.511.323	1	1.004.776.663	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	4	13.312.095	4	13.711.458	4	14.122.801	4	14.546.485	4	14.982.880	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4	14.609.551.822	4	12.015.938.350	4	12.376.416.501	4	12.747.708.995	4	33.130.140.265	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	79	105	4.947.280.499	95	3.957.824.399	91	4.076.559.131	91	4.198.855.905	91	4.324.821.582	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	806	495	7.517.731.305	393	6.014.185.044	387	6.194.610.596	373	6.380.448.913	373	6.571.862.381	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	9	1.213.258.538	13	1.213.258.538	13	1.249.656.294	12	1.287.145.983	12	1.325.760.362	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70	67	931.281.480	68	830.670.369	67	855.590.480	72	881.258.194	70	907.695.940	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	63.846.829.239	4	66.395.052.844	4	69.051.364.094	4	71.820.587.663	4	74.707.772.075	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	912	912	31.640.936.409	912	33.222.983.229	912	34.884.132.390	912	36.628.339.010	912	38.459.755.961	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	304	304	5.305.801.966	304	5.464.976.025	304	5.628.925.306	304	5.797.793.064	304	5.971.726.857	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	132	132	26.900.090.864	132	27.707.093.590	132	28.538.306.398	132	29.394.455.589	132	30.276.289.257	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	50.899.659.225	4	48.810.010.576	4	53.904.100.731	4	59.695.482.064	4	46.286.743.586	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	565	475	6.310.292.033	486	6.499.600.794	481	6.694.588.818	481	6.895.426.482	481	7.102.289.276	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	31	189	47.981.025	257	49.420.455	234	50.903.069	235	52.430.161	237	54.003.066	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1386	1257	2.369.100.811	1269	2.440.173.835	1289	2.513.379.050	1286	2.588.780.421	1293	2.666.443.834	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	84	77	32.878.531.128	76	30.248.248.638	80	34.785.485.934	74	40.003.308.824	80	26.003.805.148	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	136	129	7.087.733.964	132	7.300.365.983	133	7.519.376.962	134	7.744.958.271	133	7.977.307.020	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1325	1275	2.206.020.264	1172	2.272.200.871	1211	2.340.366.898	1257	2.410.577.905	1267	2.482.895.242	
Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	4	4	3.797.611.878	4	3.994.284.694	4	4.211.103.200	4	4.738.759.870	4	4.270.461.533	
	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	
	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	
Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase capaian kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di atas 80%	100	100	3.797.611.878	100	3.994.284.694	100	4.211.103.200	100	4.738.759.870	100	4.270.461.533	
	Persentase Perkara/ Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkat Kapasitasnya	2342	2341	101.250.000	2360	104.287.500	2360	107.416.125	2360	110.638.608	2290	113.957.767	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	4	4	12.600.000	4	12.978.000	4	13.367.340	4	13.768.360	4	14.181.411	
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	4	4	18.900.000	4	19.467.000	4	20.051.010	4	20.652.540	4	21.272.116	
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	4	4	209.930.000	4	216.227.900	4	222.714.737	4	229.396.179	4	236.278.064	
Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	1	1	9.300.000	1	9.579.000	1	9.866.370	1	10.162.361	1	10.467.232	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	4	4	18.180.000	4	18.725.400	4	19.287.162	4	19.865.777	4	20.461.750	
Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	4	4	540.137.606	4	556.341.734	4	573.031.986	4	590.222.946	4	607.929.634	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	4	4	468.002.000	4	482.042.060	4	496.503.322	4	511.398.421	4	526.740.374	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	2	2	12.600.000	2	12.978.000	2	13.367.340	2	13.768.360	2	14.181.411	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	2	2	12.250.000	2	12.617.500	2	12.996.025	2	13.385.905	2	13.787.482	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	2	2	2.160.000	2	2.224.800	2	2.291.544	2	2.360.290	2	2.431.099	
Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	1	1	120.738.000	1	120.738.000	1	120.738.000	1	120.738.000	1	120.738.000	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	2	2	45.528.593	2	46.894.451	2	48.301.284	2	49.750.323	2	51.242.832	
Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	4	4	213.500.000	4	219.905.000	4	226.502.150	4	233.297.214	4	240.296.131	
Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	2	2	31.200.000	2	32.760.000	2	32.760.000	2	34.398.000	2	36.117.900	
Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	2	2	3.600.000	2	3.708.000	2	3.819.240	2	3.933.817	2	4.051.831	
Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	4	4	12.900.000	4	13.287.000	4	13.685.610	4	14.096.178	4	14.519.063	
Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	2	2	12.600.000	2	12.978.000	2	13.367.340	2	13.768.360	2	14.181.411	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	2	2	5.400.000	2	5.562.000	2	5.728.860	2	5.900.725	2	6.077.747	
Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	4	4	27.050.000	4	27.861.500	4	28.697.345	4	29.558.265	4	30.445.013	
Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	12	12	917.995.679	12	945.535.549	12	973.901.616	12	1.003.118.664	12	1.033.212.224	
Pelaksanaan *Character Building* Pegawai Kota Administrasi	Jumlah Pegawai Kota Administrasi yang Mengikuti *Character Building* yang Dilaksanakan	0	0	0	115	80.000.000	240	192.000.000	745	596.000.000	0	0	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	2	2	48.750.000	2	51.187.500	2	51.187.500	2	53.746.875	2	56.434.219	
Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	4	4	43.200.000	4	44.496.000	4	45.830.880	4	47.205.806	4	48.621.980	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi	4	4	25.000.000	4	26.250.000	4	26.250.000	4	27.562.500	4	28.940.625	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi	4	4	91.350.000	4	95.579.100	4	96.101.928	4	100.548.015	4	105.205.637	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi	4	4	78.700.000	4	81.061.000	4	83.492.830	4	85.997.615	4	88.577.543	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	4	4	316.800.000	4	326.304.000	4	336.093.120	4	346.175.914	4	356.561.191	
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi	4	4	119.150.000	4	125.107.500	4	125.107.500	4	131.362.875	4	137.931.019	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/ *Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi	2	2	7.740.000	2	7.972.200	2	8.211.366	2	8.457.707	2	8.711.439	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/ Pembangunan/Rehab Total/ Rehab Berat/ Rehab Sedang/ Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/ Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/ Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi	0	2	19.800.000	2	20.790.000	2	21.829.500	2	22.920.975	2	24.067.024	
Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kota Administrasi	2	2	251.300.000	2	258.839.000	2	266.604.170	2	274.602.295	2	282.840.364	

Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

IV.2. Program Prioritas Daerah

Program-program di Kota Administrasi Jakarta Timur tidak secara langsung mendukung program prioritas Kepala Daerah, seperti *Quick Wins*, 10 Program Kerja, DKI *Strategic Project* (DSP), maupun *Global City Program* (GCP). Namun, program-program di Kota Administrasi Jakarta Timur mendukung secara langsung pada peningkatan Indeks Pelayanan Publik yang mana termasuk pada indikator RPJMD pada Sasaran Meningkatnya Kemudahan dan Kualitas Layanan Masyarakat dalam Misi 3 yakni Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal dan di Tujuan 3 Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern.

Selain itu, terdapat 2 (dua) subkegiatan Kota Administrasi Jakarta Timur yang mendukung program Kepala Daerah yang disajikan dalam Tabel IV.3.

Tabel IV.3 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

PROGRAM	*OUTCOME*	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	• Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik • Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mendukung Program Konstruksi dan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan pada DKI *Strategic Project* (DSP)

Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

IV.3. Program Prioritas Perangkat Daerah

Dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta, Walikota/Bupati tidak hanya berfungsi sebagai koordinator, tetapi juga memiliki peran strategis dalam penyelesaian permasalahan di tingkat kota. Selain melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, Walikota/Bupati bertindak sebagai Perangkat Daerah yang mengemban tugas koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksana teknis sektoral di wilayah kerjanya. Upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah administrasi kota/kabupaten dilaksanakan melalui perbaikan kualitas layanan

publik, optimalisasi hasil pembangunan, serta peningkatan aksesibilitas dan kemudahan layanan bagi masyarakat.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan rangkaian program prioritas Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Walikota Administrasi Jakarta Timur sebagai Perangkat Daerah unit pembantu Gubernur. Adapun penyusunan program prioritas dalam bab ini merujuk pada dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta disajikan sebagai berikut :

IV.3.1. Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan

Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan merupakan elemen strategis dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah yang berperan sebagai ujung tombak penyelenggaraan layanan publik di tingkat paling dasar. Program ini dirancang untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Melalui program ini, Pemerintah Daerah mendorong terwujudnya wilayah yang tertib, partisipatif, tangguh, serta berdaya saing sosial dan budaya.

Program ini dilaksanakan melalui penguatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, sebagai garda terdepan pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan kenyamanan layanan bagi warga, Pemerintah Kota Administratif Jakarta Timur melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat partisipatif yang mencakup :

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan;
- Pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat untuk memperkuat ketahanan sosial;
- Penguatan kelembagaan kelurahan melalui optimalisasi peran Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- Pelaksanaan program bina mental dan spiritual yang merupakan kegiatan keagamaan;
- Penanganan bencana alam maupun non-alam secara terpadu dan responsif;
- Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu sebagai bentuk fasilitasi demokrasi di tingkat lokal.

Keberhasilan implementasi program ini diukur melalui indikator nilai kepuasan terhadap layanan pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan, yang mencakup aspek penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM. Indikator tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam membangun tata kelola yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan.



Gambar IV.1 Pembinaan Perwakilan RT, RW, LMK Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
Sumber: https://timur.jakarta.go.id/, 2025

IV.3.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan upaya strategis Pemerintah Daerah dalam memperkuat kapasitas sosial masyarakat serta meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan berbasis komunitas. Program ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang berdaya, inklusif, dan berkelanjutan melalui optimalisasi peran kelembagaan masyarakat di tingkat lingkungan.

Pelaksanaan Program ini mencakup dua kegiatan utama yang saling melengkapi dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Pertama, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, yang bertujuan mendorong keterlibatan langsung warga dalam berbagai aktivitas sosial, seperti pengelolaan lingkungan, peningkatan kesejahteraan keluarga, hingga penguatan nilai-nilai kebersamaan. Keterlibatan langsung warga tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat terhadap layanan seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu), Juru Pemantau Jentik (Jumantik),

dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), yang menjadi simpul interaksi sosial sekaligus wadah pemberdayaan. Kedua, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan ini fokus pada penguatan peran PKK dalam kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan di wilayahnya. Kegiatan ini juga mendorong sinergi antar lembaga dalam membangun ketahanan sosial, memperkuat kapasitas warga, dan memastikan keberlanjutan program pembangunan berbasis komunitas.

Keberhasilan dari pelaksanaan program ini diukur melalui Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA. Indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan-layanan pemberdayaan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat ikatan sosial di tingkat lokal. Tingkat kepuasan masyarakat menjadi landasan evaluatif sekaligus arah penguatan berkelanjutan terhadap kualitas layanan dan efektivitas program di masa mendatang.



Gambar IV.2 Pelaksanaan Penanaman Bibit Cabai oleh Tim Penggerak PKK Kota Jakarta Timur
Sumber: https://timur.jakarta.go.id/, 2025

IV.3.3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan program yang dirancang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memberikan dukungan kepada Perangkat Daerah dalam rangka

meningkatkan kualitas layanan publik dan mencapai hasil pembangunan yang optimal, serta memastikan konsistensi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan arah strategis Pemerintah Provinsi. Sehingga, Program ini menjadi landasan kegiatan administratif, teknis, dan operasional yang memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.

Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mencakup koordinasi di Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup serta Kesejahteraan Rakyat. Di sisi lain, Walikota memiliki tanggung jawab strategis terhadap kualitas infrastruktur perkantoran, termasuk Kantor Walikota, Kecamatan dan Kelurahan beserta seluruh fasilitas pendukungnya. Infrastruktur tersebut berfungsi sebagai wajah utama pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif. Melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, diharapkan tercipta sinergi antar sektor, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Program ini menjadi fondasi penting dalam mendukung terwujudnya Jakarta sebagai Kota Global yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.



Gambar IV.3 Rehab Kantor Kelurahan Ujung Menteng
Sumber: https://www.beritajakarta.id, 2022

IV.3.4. Program Pengelolaan Kota Administrasi

Program Pengelolaan Kota Administrasi merupakan program prioritas yang dirancang untuk memperkuat tata kelola Pemerintahan, meningkatkan efektivitas

koordinasi lintas bidang, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Program ini berorientasi pada pencapaian indikator Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat. Ketiga indikator tersebut menjadi instrumen penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam menyinergikan kebijakan pembangunan, memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah, serta memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Program ini diwujudkan melalui kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi, yang mencakup sejumlah subkegiatan strategis. Pertama, Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi, yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. Kedua, Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM, yang mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang inklusif, humanis, serta berorientasi pada pemenuhan hak dasar warga. Selanjutnya, dilaksanakan Koordinasi, Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan, yang berfungsi untuk memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah. Program ini juga didukung dengan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi, yang menjadi pedoman dalam meningkatkan konsistensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, terdapat subkegiatan Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat serta Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi, yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan penanganan aspirasi warga secara tepat dan transparan. Sebagai pelengkap, Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan.

Dengan pelaksanaan Program secara terarah dan berkesinambungan, diharapkan efektivitas koordinasi pemerintahan di Kota Administrasi dapat semakin meningkat, pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berkualitas, serta kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tabel IV.4 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Perangkat Daerah

No. (1)	Program (2)	*Outcome* (3)	Kegiatan/Subkegiatan (4)	Ket. (5)
1.	Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan	Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	1.a.Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan • Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan • Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat • Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK • Pelaksanaan Bina Mental Spiritual • Penanganan Bencana • Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya • Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu • Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	2.a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan • Pemberdayaan Masyarakat 2.b.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan • Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan • Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
4	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	.4.a.Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi • Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi • Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi • Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi • Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi • Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi • Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi • Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	

Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

IV.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan Indikator kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, yang secara khusus mengukur keberhasilan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Penetapan indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan atau capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan memperhatikan kondisi aktual saat ini serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kinerja di masa mendatang. Ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dituangkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing perangkat daerah. Sementara itu, target dari penyelenggaraan urusan ditentukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang mencerminkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu urusan pemerintahan tercapai. Penetapan indikator kinerja menjadi komponen penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan rencana kinerja harus selaras dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029. Adapun rincian target capaian IKU dan IKK Kota Administrasi Jakarta Timur untuk periode 2025–2029 disajikan dalam Tabel IV.5 dan IV.6.

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029

NO.	IKU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**Indeks Reformasi Birokrasi**								
3.d	**Indeks Pelayanan Publik**								
I	Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4
I.1	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4
I.2	Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4

Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Tabel IV.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029

No.	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	**Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi**								
I.1	**Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan**								
I.1.1	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4
I.1.2	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4
I.1.3	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4
I.1.4	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4
I.2	**Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi**								
I.2.1	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik	Persen	56	60	62	64	66	68	68
1.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4
I.2.3	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4

No.	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.4	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4
1.2.5	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4	4

Sumber: Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan di tingkat kota administratif. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang dirumuskan secara komprehensif. Penyusunannya dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal, sehingga mampu merefleksikan kebutuhan, permasalahan, serta aspirasi masyarakat di wilayah Jakarta Timur.

Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen yang memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain itu, Renstra berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintah kota administratif, sekaligus sebagai pedoman dalam mengarahkan pembangunan agar lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Dengan semangat kolaborasi dan tata kelola yang baik, Kota Administrasi Jakarta Timur siap melaksanakan peran strategisnya sebagai pusat pemerintahan yang dinamis dan inklusif, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dengan demikian, Renstra tidak hanya diposisikan sebagai dokumen perencanaan, melainkan juga sebagai instrumen penggerak pembangunan yang berdaya guna.

Pelaksanaan Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur akan senantiasa dikendalikan dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi dilakukan guna menilai capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah perbaikan di masa mendatang. Mekanisme pengendalian dan evaluasi yang terstruktur ini diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi Renstra terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus memperkuat peran Jakarta Timur dalam mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2025–2029 dan mendukung arah Rencana Pembangunan Nasional.

Dengan demikian, Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman yang efektif dalam memfasilitasi implementasi kebijakan strategis, mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta memperkuat kontribusi Jakarta Timur terhadap pembangunan Provinsi DKI Jakarta menjadi Kota Global dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.